LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

TAHUN 2019

BAGIAN ORGANISASI & TATA LAKSANA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

TAHUN 2019

BAGIAN ORGANISASI & TATA LAKSANA

Kata Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019" dapat kami selesaikan.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan selama Tahun 2019 dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Di samping itu merupakan rangkaian pelaksanaan evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengemban Visi, Misi dan Tujuan Kabupaten Penajam Paser Utara. Perlu diketahui bahwa perhitungan Nilai Capaian Kinerja dan Pengukuran Evaluasi Kinerja menggunakan indikator yang terbatas dan disesuaikan dari data yang tersedia.

Di samping itu, laporan ini diharapkan dapat dipakai sebagai gambaran tentang Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan merupakan satu di antara upaya sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara ini telah direviu oleh Inspektorat Kabupaten sesuai ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami mengharapkan saran dan kritik demi sempurnanya penyusunan laporan ini, yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan di tahun mendatang.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

H. Abdul Gafur Mas'ud, S.E

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
INSPEKTORAT DAERAH
Alamat : Jalan Provinsi Kilometer 1 Penajam Telp. 0542-7200413
Email : inspektorat.ppu@gmail.com
Sanapati : Inspektorat.kab_penajam_paser_utara@sanapati.net
Website : inspektorat.penajamkab.go.id

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, masih terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Penajam, 24 April 2020

Inspektur Daerah,

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
INSPEKTORAT

H. Haeran Yusni, S.Sos, M.M, CFrA.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620221 198503 1 011

Ringkasan Eksekutif

Perubahan sikap, mental dan perilaku aparatur sangat penting untuk menciptakan tata laksana pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga pemerintah dituntut untuk lebih terbuka serta dapat melakukan pertanggungjawaban kegiatan kepada publik. Karenanya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 yang merupakan salah satu media pertanggungjawaban kinerja Kabupaten Penajam Paser Utara kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2019. Secara garis besar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program yang kesemuanya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara 2018-2023. Selanjutnya dari RPJMD ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019, serta untuk mengukur kinerja ditetapkan indikator kinerja sasaran.

Hasil capaian kinerja masing-masing program dan kegiatan yang ditetapkan Tahun 2019 secara keseluruhan dan detail dituangkan pada lampiran Pengukuran Kinerja (PK) laporan ini. Beberapa indikator sasaran masih ada yang belum mencapai nilai baik, hal ini tentunya akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dengan cara peningkatan kinerja melalui komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, serta masyarakat ,dan disiplin pelaksanaan program yang telah disepakati.

Berdasarkan nilai capaian kinerja sasaran pada tahun 2019, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki rata-rata nilai capaian kerja sebesar 217,41% dalam kategori “Sangat Berhasil”. Dengan sasaran strategis sebanyak 12 sasaran dan 31 indikator kinerja.

Daftar Isi

Kata Pengantar i

Ringkasan Eksekutif iii

Daftar Isi iv

Daftar Tabel v

Daftar Grafik vi

BAB I PENDAHULUAN 1

- 1 A. Gambaran Umum Daerah
- 4 B. Kedudukan dan Fungsi Organisasi
- 5 C. Sumber Daya Aparatur
- 7 D. Isu Strategis dan Permasalahannya
- 23 E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA 26

- 26 A. Visi dan Misi
- 28 B. Tujuan dan Sasaran
- 30 C. Indikator Kinerja, Strategi dan Arah Kebijakan
- 37 D. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
- 44 E. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 46

- 46 A. Capaian Kinerja Organisasi
- 78 B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP 88

Lampiran I Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Lampiran II Rencana Kinerja Tahun 2019

Lampiran III Pengukuran Kinerja Tahun 2019

Lampiran III Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya Tahun 2019

Daftar Tabel

Tabel I.1 Kecamatan, Kelurahan, dan Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 2

Tabel I.2 Penyebaran Penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 3

Tabel II.1 Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara 28

Tabel II.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kabupaten Penajam Paser Utara 31

Tabel II.3 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara 37

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 46

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 47

Tabel III.3 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016 – 2019 50

Tabel III.4 Persentase Capaian APK SD/ MI Kabupaten terhadap APK Nasional 55

Tabel III.5 Persentase Capaian APK SMP N/MTs terhadap APK Nasional 55

Tabel III.6 Jumlah Lembaga PAUD Tahun 2017 - 2019 56

Tabel III.7 Persentase Capaian APM SD/ MI Kabupaten terhadap APM Nasional 57

Tabel III.8 Persentase Capaian APM SMP N/MTs terhadap APM Nasional 58

Tabel III.9 Perolehan Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 77

Tabel III.11 Laporan Realisasi APBD T.A 2019 79

Tabel III.12 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program 2019 82

Daftar Grafik

Grafik I.1 Penduduk Penajam Paser Utara Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019 3

Grafik I.2 Penduduk Penajam Paser Utara Berdasarkan Agama Tahun 2019 3

Grafik I.3 Pegawai Berdasarkan Eselon Tahun 2019 6

Grafik I.4 Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2019 6

Grafik III.1 Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2019 47

Grafik III.2 Angka Putus Sekolah Tahun 2018 - 2019 59

Grafik III.3 Angka Melanjutkan dari SD/ MI ke SMP N/ MTs 60

Grafik III.4 PAD Tahun 2016 – 2019 72

Grafik III.5 Proporsi Realisasi Belanja pada APBD Tahun 2019 78

BAB I
Pendahuluan

A Gambaran Umum Daerah

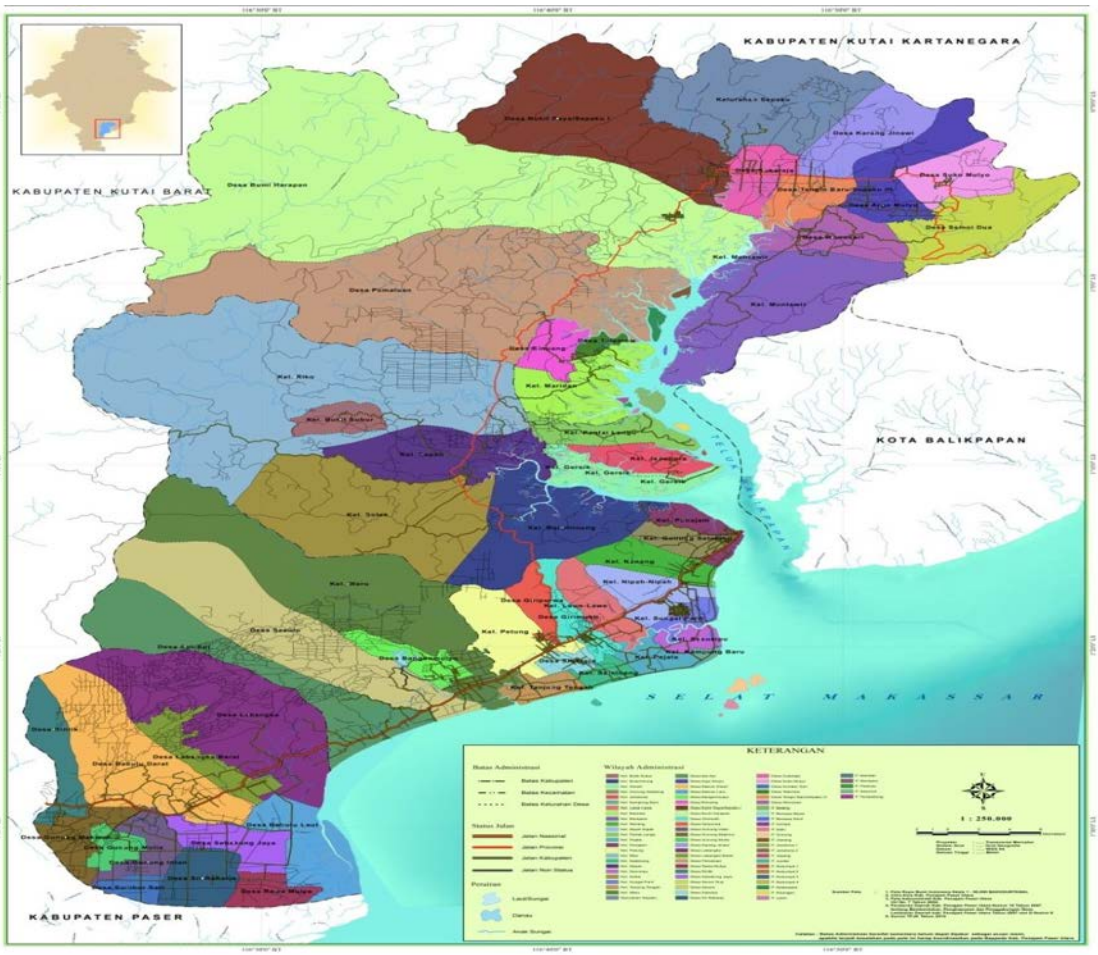

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur.

Kabupaten Penajam Paser Utara secara geografis terletak

antara $00^{0}48'29"$-$01^{0}36'37"$ Lintang Selatan dan $116^{0}19'30"$- $116^{0}56'35"$ Bujur Timur. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki luas wilayah 3.333,06 Km^2 meliputi wilayah daratan seluas 3.060,82 Km2 dan wilayah lautan seluas 272,24 Km^2.

Secara administratif pemerintahan KabupatenPenajamPaser Utara terbagi atas 4 kecamatan, 24 kelurahan dan 30 desa yang terdiri dari :

Tabel I.1 Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019

Kecamatan Penajam	Kecamatan Waru	Kecamatan Babulu	Kecamatan Sepaku
Kelurahan Tanjung Tengah	Kelurahan Waru	Desa Gunung Makmur	Kelurahan Maridan
Kelurahan Saloloang	Desa Api-api	Desa Gunung Intan	Kelurahan Mentawir
Kelurahan Lawe-lawe	Desa Sesulu	Desa Sumber Sari	Kelurahan Pemaluan
Kelurahan Pejala	Desa Bangun Mulia	Desa Sri Raharja	Kelurahan Sepaku
Kelurahan Petung		Desa Rawa Mulia	Desa Telemow
Kelurahan Kampung Baru		Desa Sebakung Jaya	Desa Binuang
Kelurahan Sesumpu		Desa Babulu Laut	Desa Bumi Harapan
Kelurahan Sungai Parit		Desa Babulu Darat	Desa Wono Sari
Kelurahan Nipah-nipah		Desa Labangka	Desa Semoi Dua
Kelurahan Nenang		Desa Rintik	Desa Argo Mulyo
Kelurahan Gunung Seteleng		Desa Gunung Mulia	Desa Suko Mulyo
Kelurahan Penajam		Desa Labangka Barat	Desa Tengin Baru
Kelurahan Buluminung			Desa Suka Raja
Kelurahan Sotek			Desa Bukit Raya
Kelurahan Sepan			Desa Karang Jinawi
Kelurahan Riko			
Kelurahan Pantai Lango			
Kelurahan Gersik			
Kelurahan Jenebora			
Desa Girimukti			
Desa Bukit Subur			
Desa Sido Rejo			
Desa Giri Purwa			

Jumlah penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tahun 2019 berdasarkan data Badan Pusat Statistik, berjumlah 160.912 jiwa. Penyebaran penduduk di setiap kecamatan masih belum merata di setiap kecamatan. Dengan melihat luas wilayah

kecamatan dan jumlah penduduk, maka dapat dilihat kepadatan penduduk per km², dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.2 Penyebaran Penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019

Kecamatan	Luas (Km^2)	Penduduk	Kepadatan (per Km^2)
Penajam	399,45	32.738	81,96
Waru	553,88	18.463	33,33
Babulu	1.207,37	78.248	64,81
Sepaku	1.172,36	31.463	26,84
	3.333,06	**160.912**	**48,28**

Grafik I.1 Penduduk Penajam Paser Utara Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019

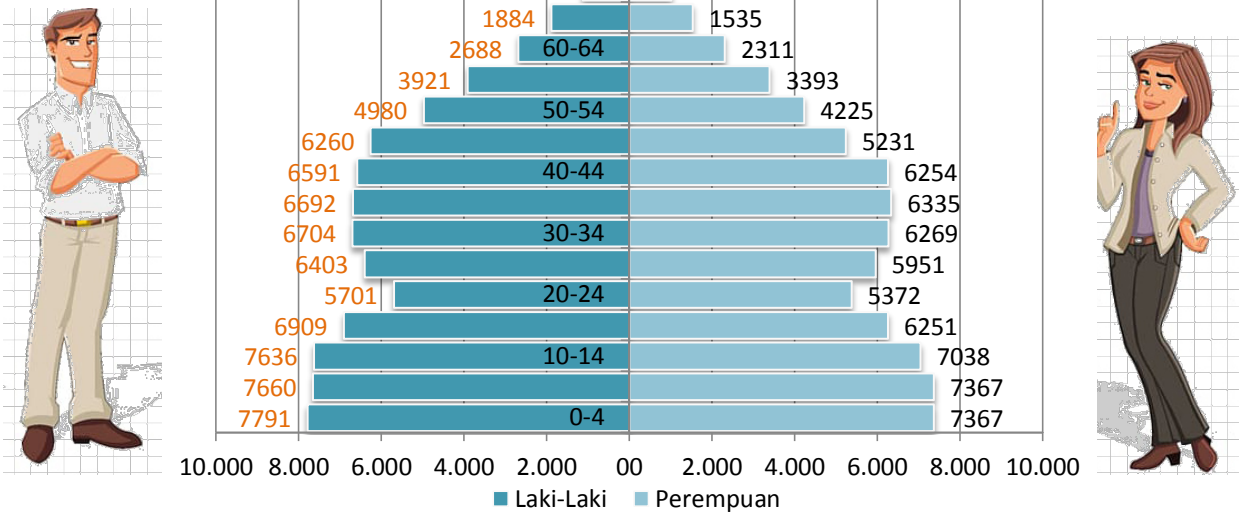

Grafik I.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Agama Tahun 2019

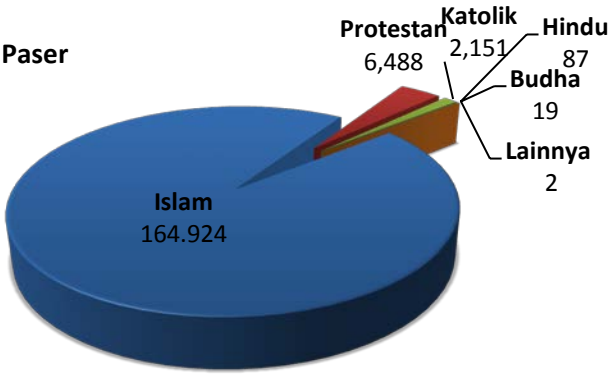

B Kedudukan dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai kewenangan mencakup semua kewenangan pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, system administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam, serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu:

1. Seketariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
8. Satuan Polisi Pamong Praja
9. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
10. Dinas Sosial
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13. Dinas Ketahanan Pangan

14. Dinas Lingkungan Hidup
15. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17. Dinas Perhubungan
18. Dinas Komunikasi dan Informasi
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
22. Dinas Perpustakaan dan Arsip
23. Dinas Perikanan
24. Dinas Pertanian
25. BadanPerencanaan, Penelitian dan Pengembangan
26. Badan Keuangan
27. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
28. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
29. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
30. Rumah Sakit Umum Daerah
31. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
32. Kecamatan Penajam
33. Kecamatan Waru
34. Kecamatan Babulu
35. Kecamatan Sepaku

C Sumber Daya Aparatur

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat maka perlu ditunjang oleh sumber daya aparatur yang memadai. Satu di antara tiga kebijakan pemerintah provinsi dan juga kebijakan utama yang akan diterapkan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, hal ini sangat penting dalam rangka meningkatkan kompetensi dan produktivitas masyarakat yang sebelum berlangsungnya otonomi daerah, masih ketinggalan dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Peningkatan

kualitas sumber daya manusia merupakan investasi yang takternilai harganya dan sangat berperan dalam kelangsungan kemajuan KabupatenPenajamPaser Utara khususnya dan Kalimantan Timur pada umumnya di masa yang akan datang.

Sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tahun 2019 berjumlah 3.612 Pegawai Negeri Sipil dengan gambaran komposisi aparatur menurut jabatan dan golongan adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan Eselon

Grafik I.3 Pegawai Berdasarkan Eselon Tahun 2019

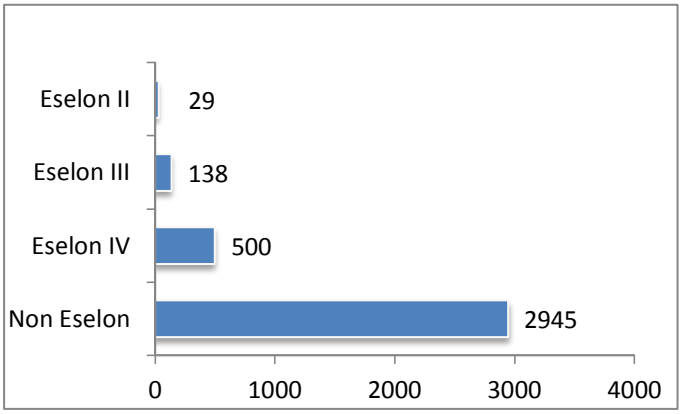

b. Berdasarkan Golongan

Grafik I.4 Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2019

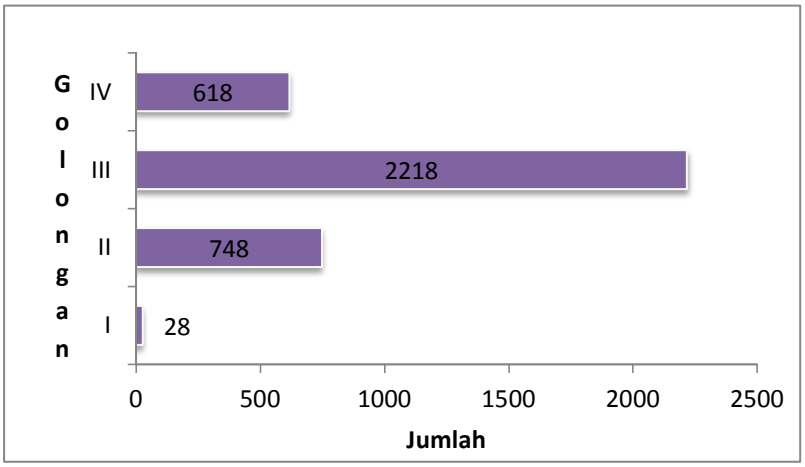

D Isu Strategis dan Permasalahannya

Berdasarkan analisis masalah yang telah dilakukan, berikut identifikasi isu strategis secara internal yang ada dan dapat dikelola oleh Kabupaten Penajam Paser Utara. Isu ini harus mendapat perhatian untuk dikelola pada RPJMD yang akan datang sehingga tujuan pembangunan, visi dan misi yang dicanangkan oleh Bupati dapat dicapai dengan baik.

1. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Penajam Paser Utara 2015 - 2025

Dalam RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Nasional 2005-2015, maka Visi Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025 adalah : **Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang berakhlak Baik, Mandiri, Sehat dan Sejahtera Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan.**

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui delapan misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1) Mewujudkan revitalitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang berkelanjutan untuk menciptakan lapangan kerja guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

Penajam Paser Utara dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Kalimantan Timur, oleh karenannya untuk mempertahankan dan mengembangkan potensi pertanian akan dilakukan terus menerus secara berkesinambungan. Revitalisasi pertanian, perkebunan dan perikanan dengan dukungan kebijakan pemerintah akan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas dan menyerap tenaga kerja guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

2) **Meningkatkan sarana prasarana penunjang produktivitas ekonomi masyarakat.**

Posisi Penajam Paser Utara yang berhadapan dengan Balikpapan dapat dikatakan sebagai pintu masuk arah Samarinda menuju Banjarmasin sehingga memiliki nilai strategis. Sarana pelayanan publik merupakan modal dasar pembangunan di suatau pemerintahan daerah dan tersedianya infrastruktur sosial dasar, perhubungan, telekomunikasi, informasi dan energi.

3) **Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, disiplin, bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggungjawab, efisien dan efektif yang dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang prima.**

Mewujudkan visi Kabupaten Penajam Paser Utara dengan mengembangkan tata pemerintahan yang baik melalui peningkatan kinerja pelayanan prima di berbagai sektor publik, yang didukung perangkat daerah yang efektif dan efisien, aparatur yang bertanggungjawab dan berwibawa dalam suasana politik dan hukum yang kondusif dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

4) **Mewujudkan pembangunan agrobisnis subsistem budidaya dan subsistem hilir untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing daerah serta menciptakan dasar pengembangan agroindustri berdasarkan keunggulan dan daya saing pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.**

Agrobisnis merupakan suatu kegiatan integratif dari hulu hingga pemasaran yaitu subsistem hulu, subsistem budidaya, subsistem hilir dan subsistem pemasaran. Potensi yang ada dan potensial untuk dikembangkan dalam sistem agrobisnis saat ini adalah subsistem budidaya dan subsistem pemasaran.

5) **Menciptakan ekonomi kerakyatan yang maju dan berkesinambungan sebagai satu kesatuan dengan pembangunan agrobisnis dan agroindustri.**

Keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) merupakan titik berat pembangunan agrobisnis dan agroindustri dimana secara umum UMKM merupakan penopang ekonomi nasional dan mampu

menyerap tenaga kerja. Dukungan kebijakan pemerintah bagi UMKMK dan UMKMK yang partisipatif yang ditunjukkan dengan profil UMKMK yang transparan dan akuntabel akan melahirkan sinergi pembangunan ekonomi kerakyatan.

6) **Mengembangkan potensi wilayah yang berwawasan lingkungan.**

Pengelolaan Lingkungan Hidup harus berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, pencemaran lingkungan harus dicegah baik itu pencemaran darat, laut maupun udara. Hal ini dimaksudkan untuk tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

7) **Mewujudkan sumber daya masyarakat Penajam Paser Utara yang maju dan berakhlak baik.**

Masyarakat yang maju dan berakhlak baik diharapkan mampu mewujudkan cita-cita Kabupaten Penajam Paser Utara, hal ini diwujudkan dengan melaksanakan program-program yang berkesinambungan di bidang peningkatan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan agama serta pendidikan agama serta pelestarian kebudayaan.

8) **Mewujudkan jaringan intrastruktur transportasi dan prasarana utility yang handal dan terintegrasi satu sama lain di Kabupaten Penajam Paser Utara.**

Termasuk didalamnya tersedianya pasokan energi listrik yang cukup untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Selain itu tersediannya air bersih untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri serta sistem informasi berbasis elektronik yang mampu mendorong produktifitas sektor-sektor ekonomi.

2. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Wajib dibagi dalam urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan dasar. Untuk urusan Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar

yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelaksanaan pelayanan dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan pada pedoman SPM tersebut, Pemerintah Penajam Paser Utara telah memiliki dokumen SPM yang capaiannya disesuaikan dengan kondisi daerah.

3. Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan merupakan faktor kunci keberhasilan peningkatan daya saing. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem informasi nasional yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem informasi.

Sejalan dengan isu internasional, nasional, regional maupun lokal, serta memperhatikan permasalahan yang perlu diprioritaskan penyelesaiannya dalam kurun waktu 2019 – 2023, maka dirumuskan isu strategis Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan;
2. Pemenuhan layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat dan peningkatan kesadaran kesehatan lingkugan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
3. Penanggulangan kemiskinan, permasalahan sosial dan pengangguran;
4. Peningkatan kualitas infrastruktur dan jangkauan aksesibilitas layanan infrastruktur;
5. Penyediaan utilitas permukiman seperti air bersih, drainase, persampahan maupun air limbah;
6. Penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi;
7. Peningkatan perekonomian dengan memperhatihan potensi lokal melalui pemberdayaan masyarakat serta lembaga-lembaga ekonomi setempat;

8. Pengembangan industri khususnya sektor sekunder dan tersier yang berdasarkan peningkatan nilai tambah pengolahan hasil pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;
9. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas SDM aparatur dengan didukung pengembangan teknologi informasi;
10. Optimalisasi peningkatan PAD dengan memperhatikan prinsip-prinsip perekonomian berkeadilan;
11. Penciptaan iklim investasi melalui penyediaan infrastruktur dan regulasi;
12. Penguatan UKM dan Koperasi secara menyeluruh;
13. Peningkatan kapasitas aparatur dalam rangka perwujudan *good governance*.

Secara umum permasalahan di Kabupaten Penajam Paser Utara diuraikan dalam pemasalahan pembangunan berdasarkan urusan yang menjadi tanggung jawab Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu sebagai berikut:

1. Layanan Urusan Pemerintah Wajib

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- Penempatan tenaga pendidik (guru) belum dilakukan secara merata, masih terdapat kesenjangan baik dari sisi jumlah maupun kualitas.
- Minimnya fasilitas perpustakaan dan laboratorium.
- Partisipasi *stakeholders* dalam penyelenggaraan pendidikan berkualitas masih rendah.
- Kurangnya jumlah dan kualitas Sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan pemuda dan olahraga yang layak.

2. Kesehatan

- Belum optimalnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
- Kurangnya ketersediaan dan kurang meratanya distribusi tenaga kesehatan beserta sarana prasarana pendukung.
- Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh.
- Kesadaran terhadap perilaku hidup bersih dan sehat dari berbagai kelompok masyarakat masih belum optimal.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Infrastruktur memegang peranan penting dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program pembangunan terus dilaksanakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur.

- Kualitas jalan terbangun masih rendah (jenis permukaan jalan masih didominasi untuk tanah timbunan dan agregat).
- Belum meratanya Penerangan Jalan Umum (PJU).
- Belum terpenuhinya ketersediaan bangunan gedung untuk pemerintahan.
- Rendahnya kualitas dan kuantitas irigasi.
- Belum tersedianya data dasar daerah irigasi beserta jaringannya yang berbasis teknologi informasi.
- Belum seimbangnya upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.
- Belum terlaksananya peraturan tentang sumber daya air secara bijaksana agar pengelolaan dapat diselenggarakan secara seimbang dan terpadu.
- Masih minimnya kesiapan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
- Perda RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodir dinamika pembangunan.
- Belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi penataan ruang serta penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.
- Belum ditetapkannya peraturan turunan perda RTRW guna mendukung rencana pengembangan wilayah dan dinamika pembangunan.
- Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya.

4. Perumahan Rakyat dan Permukiman

- Masih banyaknya rumah penduduk yang belum layak huni.
- Masih terbatasnya kemampuan penyediaan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- Persentasi kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman dengan kategori baik belum mencapai 100%.

- Masih banyak bidang tanah milik pemerintah yang belum bersertifikat.
- Belum optimalnya kinerja prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi.
- Belum adanya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
   - Kondisi geografis Kabupaten Penajam Paser Utara dengan cakupan wilayah yang cukup luas merupaan kendala bagi Satuan Pamong Praja untuk melakukan pemantauan secara maksimal.
   - Masih terdapat masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana.
   - Infrastruktur penanganan bencana belum memadai.
   - Cakupan pelayanan bencana kebakaran masih belum tersentral pada ibukota Kabupaten.
   - Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana belum terlatih.
   - Kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam mematuhi peraturan.
   - Sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban belum memadai.

6. Sosial
   - Belum tersediannya *database* permasalahan sosial yang komprehensif dan terkini.
   - Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan masih belum maksimal.
   - Cakupan pelayanan program kesejahteraan social yang masih terbatas, sebagai dampak melemahnya fungsi koordinasi pada berbagai sektor.

b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja
   - Tingkat Pengangguran masih relatif tinggi.
   - Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   - Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik masih belum optimal.

- Lembaga perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak yang ada belum berperan secara maksimal.
- Penyelenggaraan pemenuhan hak anak sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak sangat perlu untuk dioptimalkan.

3. Pangan
   - Tingginya ketergantungan penduduk pada bahan pangan beras.
   - Pola kemitraan dalam pengelolaan dan pemasaran hasil olahan belum terbentuk sepenuhnya.

4. Lingkungan Hidup
   - Peran serta masyarakat dan sektor swasta masih tergolong rendah dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.
   - Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia belum sebanding dengan besarnya jumlah timbulan sampah dan luasnya daerah pelayanan kebersihan.
   - Belum optimalnya pengelolaan persampahan dan air limbah.

5. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   - Data kependudukan belum akurat dan mutakhir.
   - Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan belum menyeluruh.

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   - Kurang optimalnya pendampingan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan dan kelompok usaha ekonomi pedesaan.
   - Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat belum optimal.
   - Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
   - Terdapatnya beberapa wilayah kelurahan yang berdasarkan kriteria pemekaran wilayah perlu diubah menjadi desa.
   - Teknologi tepat guna belum dimanfaatkan secara optimal.
   - Kurangnya pemahaman aparatur pemerintah desa dalam memahami regulasi.

7. Perhubungan
   - Minimnya sarana, prasarana dan fasilitas pendukung perhubungan.

- Sarana dan prasarana terminal belum memenuhi syarat.
- Masih minimnya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dll).

8. Komunikasi dan Informatika
   - Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terutama untuk peningkatan pelayanan publik belum optimal.
   - *E-government* belum diimplementasikan secara optimal.
   - Sarana dan prasarana teknologi informasi belum memadai.

9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
   - Belum adanya penilaian kesehatan bagi koperasi maupun usaha kecil dan menengah.
   - Belum adanya kerjasama antara koperasi, UKM dan lembaga keuangan (Perbankan).
   - Rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola dan kesadaran anggota koperasi.
   - Minimnya pendampingan yang bersifat menyeluruh/terintegrasi bagi UMKM, mulai dari sisi kualitas SDM pelaku UMKM, akses terhadap sumber daya produktif, permasalahan infrastruktur, pemasaran hingga kualitas dan kuantitas SDM aparatur dalam pembinaan dan pendampingan UMKM.
   - Inovasi dan penerapan teknologi masih tergolong rendah.
   - Rendahnya minat masyarakat utuk memanfaatkan koperasi.

10. Penanaman Modal
    - Kurangnya data potensi unggulan daerah.
    - Data potensi penanaman modal belum memadai.
    - Dibutuhkan dukungan infrastruktur dan regulasi.
    - Lemahnya koordinasi dan fasilitasi lintas sektoral antar Perangkat Daerah

11. Kebudayaan dan Pariwisata.
    - Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan dan menjadi daya tarik yang khas untukmengundang kunjungan dari luar daerah dan dunia internasional.

- Kurangnya promosi objek wisata.
- Destinasi pariwisata belum dikembangkan secara optimal.
- Masih kurangnya sarana dan prasana penyelenggaraan seni dan budaya daerah.
- Keterbatasan aksesibilitas dalam menjangkau obyek wisata.
- Peran serta masyarakat masih cukup rendah dalam pengembangan obyek wisata setempat.

12. Perpustakaan
    - Sarana dan prasarana pendukung perpustakaan termasuk kantor belum memadai.
    - Belum adanya gedung perpustakaan yang representatif
    - Rendahnya minat baca masyarakat.
    - Masih kurangnya SDM yang memiliki kompentensi di bidang perpustakaan.
    - Belum optimalnya peran perpustakaan sebagai wahana pembelajaran masyarakat.

2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Perikanan dan Kelautan
    - Peningkatan produksi perikanan belum diikuti dengan penggunaan sarana tangkap yang ramah lingkungan.
    - Sarana dan prasarana penunjang untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi perikanan masih terbatas.
    - Keterbatasan tenaga penyuluh.
    - Masih rendahnya nilai tambah pengolahan hasil perikanan dan kelautan.
2. Pertanian
    - Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian.
    - Belum optimalnya tata guna dan tata kelola air pada lahan pertanian.
    - Produktivitas peternakan masih belum optimal.
    - Rendahnya kualitas produk peternakan dan nilai tambah dari pengolahan hasil peternakan masih sangat rendah.

3. Ketahanan Pangan
   - Ketergantungan terhadap konsumsi pangan beras lebih tinggi daripada jenis pangan karbohidrat lainnya.
   - Rendahnya ketahanan pangan terutama masyarakat miskin.

3. Fokus Layanan Penunjang Urusan

1. Pengawasan
   - Kurangnya dukungan sumber daya manusia (SDM) aparatur baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
   - Masih rendahnya penerapan pengendalian internal pemerintah pada tiap Perangkat Daerah.

2. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
   - Koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dokumen perencanaan belum optimal.
   - Proses perencanaan yang berbasis teknologi informasi belum terlaksana dengan baik.
   - Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, dianggap masih belum memadai sehingga kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan berikutnya masih lemah.
   - Proses perencanaan dengan penganggaran, yang mengarah kepada pengalokasian sumber daya yang lebih rasional dan strategis belum terwujud dan tidak sepenuhnya dirumuskan dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

3. Keuangan
   - Pengelolaan aset daerah masih belum optimal.
   - Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu memberikan kontribusi yang memadai terhadap Pendapatan Daerah.

4. Kepegawaian
   - Kualitas SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) masih relatif rendah.
   - Distribusi dan jumlah ASN belum seimbang dengan beban kerja.

- Masih terbatasnya jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- Masih terbatasnya jumlah Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural.
- Jumlah jabatan fungsional masih sangat terbatas.

5. Pemerintahan Umum
   - Kerjasama pada seluruh bidang pembangunan untuk mendukung perekonomian rakyat belum maksimal.
   - Perlunya ditingkatkan kerjasama dengan daerah lain dan pihak swasta, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, yang dalam jangka pendek dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
   - Belum optimalnya sistem pengawasan internal pada masing-masing perangkat daerah.

4. Daya Saing

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki potensi daya saing daerah yang cukup tinggi karena memiliki keberadaan sumber daya alam *(natural resources)* melimpah seperti mineral & batubara, minyak bumi & gas, pertanian, perkebunan, serta kehutanan. Dengan ditunjang oleh posisi strategis Kabupaten Penajam Paser Utara secara geografi yang berada pada jalur lintas transportasi Kalimantan, dimana menjadi jalur penghubung antara Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, juga berbatasan langsung dengan Kota Balikpapan, sebagai kota yang berdimensi Jasa dan Industri serta sebagai pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur dengan keunggulan infrastruktur khususnya dibidang transportasi udara dan laut serta dibidang informasi dan teknologi, yang pada akhirnya semakin memperkuat daya saing Kabupaten Penajam Paser Utara dalam hal aksesibilitas informasi dan transportasi. Daya saing daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dicermati dari kemampuan ekonomi daerah. Kemampuan ekonomi daerah ini sendiri dapat dianalisa dari empat (4) aspek penting. Aspek yang pertama adalah kemampuan ekonomi daerah, aspek ke dua infrastruktur, aspek ke tiga iklim investasi dan aspek ke empat sumber daya manusia.

4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian Penajam Paser Utara menunjukkan tanda semakin membaik, terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan arah positif.

Nilai PDRB PPU (ADHB) selama periode 2013-2017 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Pada tahun 2013, PDRB PPU (ADHB) sebesar Rp 6,98 triliyun dan mencapai Rp 8,45 triliyun pada tahun 2017.

4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

4.2.1 Perhubungan

Jalan sebagai sarana penunjang transportasi darat dan memiliki peran penting dalam mobilitas antar 54 desa/kelurahan, 4 kecamatan, antar 3 Kabupaten serta Kota bahkan lintas Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Sistem transportasi Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki karakteristik yang cukup kompleks dengan baik melalui darat maupun laut/perairan.

Untuk transportasi udara, saat ini sistem angkutan dan pergerakannya mengikuti pengembangan sarana prasarana yang ada di Kota Balikpapan.

Untuk transportasi darat, berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah membangun jalan sepanjang 1.240,96 km. Rel Kereta Api direncanakan akan dibangun di Kabupaten Penajam Paser Utara. Terdapat 2 jalur kereta api yakni pertama yang dibangun pihak swasta yaitu kereta api borneo (dibangun oleh Russian railways), yang kedua dibangun oleh kementerian perhubungan direktorat jenderal perkeretapian. Kereta api yang digunakan untuk barang dan penumpang. Untuk jalur kereta

api borneo melalui kawasan industri Buluminung menuju Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Sedangkan jalur kereta api yang dibangun oleh kementerian perhubungan dari Kabupaten Kutai Timur, melalui Penajam menuju Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan.

Sedangkan transportasi air, Pembangunan jembatan Pulau Balang, rencana pembangunan jembatan Nipah-Nipah – Melawai merupakan salah satu cara menghubungkan antar wilayah yang dipisahkan oleh teluk. Saat ini transportasi laut menuju dari dan ke Kota Balikpapan dilakukan dengan menaiki Fery, Speed boat dan perahu kelotok.

4.2.2 Penataan Ruang

Berdasarkan identifikasi kondisi lahan yang ada, Penajam Paser Utara memiliki kawasan produktif yang masih sangat luas untuk dikembangkan. Dari luas kawasan budidaya yang meliputi 288.623 Ha, baru 12,03% yang dimanfaatkan (Pola ruang RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara 2013-2030). Luas wilayah industri berdasarkan Pola Ruang RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara 2013-2030 adalah seluas 842 Ha, sedangkan luas budi daya adalah seluas 288.621 ha. Kawasan gerakan tanah di Kabupaten Penajam Paser Utara seluas ± 8.400 Ha.Luas lahan kering tanaman pangan yang terdapat dalam pola ruang RTRW sebesar 22.285 Ha. Sedangkan, luas wilayah perkotaan berdasarkan pola ruang RTRW adalah seluas 7.359 Ha.

4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam rangka menarik minat investasi, Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan perbaikan, pembenahan sarana dan prasarana baik berupa penyiapan kawasan seperti penetapankawasan industribuluminung maupun kelengkapan fasilitas infrastruktur dan suprastruktur serta kebijakan.

Kondisi jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan jenis permukaan Tahun 2018, bahwa total jalan yang masuk kondisi mantap

sebesar 43 persen lebih. ketersediaan bendung Lawe-Lawe yangdiharapkan rampung tahun ini, mampu menyuplai kebutuhan air bersih wilayah penajam dan sekitarnyaserta menyuplai kawasan industriBuluminung kedepannya. Surplus energilistrik melalui sambungan barito dan sambungan Mahakam diharapkan mampumenarik investor masuk ke Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kondisi keamanan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dikatakan kondusif. Dimana tidak pernah terjadi konflik horisontalselama Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk mulai Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2018.

Terkait kebijakan pelayanan publik secara prima, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara meluncurkan pelayan administrasi terpadu kecamatan (paten) pada tahun 2015. Seiring berjalannya waktu hingga saat ini inovasi-inovasi dalam hal pelayanan publik terus diciptakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

4.4.1 Rasio Tingkat Pendidikan Penduduk

Berdasarkan data pada tahun 2017, jumlah lulusan S1/S2/S3 sebanyak 1.934 orang dengan jumlah penduduk sebanyak 157.711, sehingga diperoleh Rasio Lulusan sebesar 254,64 atau dapat diartikan bahwa pada setiap 10.000 penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat 122 orang yang berpendidikan S1/S2/S3.

4.4.1 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun. Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong maju atau sedang berkembang.

Demografi Kabupaten Penajam Paser Utara, tahun 2018 mengalami penurunan nilai Rasio yang artinya mengalami pengurangan beban penduduk yang ditanggung. Pada tahun 2018, dengan nilai Rasio Ketergantungan sebesar 41,3 menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara (dianggap produktif), mempunyai tanggungan sebanyak 41 orang (dianggap belum dan tidak produktif).

4.4.2 Rencana Pengembangan Kawasan

Rencana pengembangan kawasan di Kabupaten Penajam Paser Utara pada kurun waktu 2014 - 2018 diarahkan kepada pengembangan wilayah pesisir, namun juga tidak mengesampingkan pengembangan pada wilayah-wilayah lainnya.

Konsep pengembangan wilayah yang terdapat di Kabupaten Penajam Paser Utara, dapat dijabarkan kedalam 4 Zona yaitu :

1. **Zona SATU** adalah wilayah sepanjang jalur teluk balikpapan yang berada di wilayah Kecamatan Sepaku yaitu sepanjang Mentawir, Semoi-Sepaku dan wilayah Maridan (ITCI). Kawasan ini merupakan wilayah yang dikhususkan untuk perkembangan kegiatan industri perkayuan, perkebunan kelapa sawit (beserta produk turunannya), peternakan, dan sebagian berfungsi sebagai pelabuhan batubara, secara fungsi merupakan masuk zona *"working waterfront"*.
2. **Zona KEDUA** adalah zona Industri, pelabuhan dan penelitian meliputi wilayah sepanjang teluk Balikpapan yang berada di wilayah Kelurahan Buluminung, Gersik, Jenebora, Pantai Lango dan sekitarnya. Akses penghubung yang digunakan adalah Jembatan Pulau Balang. Investasi yang telah masuk antara lain adalah pelabuhan CPO Astra, Supply Base Eiscal, Pelabuhan Pemda, Pelabuhan atau Terminal Khusus Batubara PT. PenajamPrima Coal, PT. BMS, PT. Cipaganti Resources dan Perusda BenuoTaka. Investasi yang akan masuk antara lain : Pabrik Ethanol,Smelter Nikel, dan Pusat Penelitian Kelautan BPPT.

3. **Zona KETIGA** adalah gabungan antara:
   a) *Mixed Used Waterfront a*dalah *waterfront* yang merupakankombinasi dari perumahan, perkantoran, restoran, pasar,rumah sakit, pendidikan dan/atau tempat-tempatkebudayaan.
   b) *Recreational Waterfront* adalah adalah semua kawasan*waterfront* yang menyediakan sarana-sarana dan prasaranauntuk kegiatan rekreasi, seperti taman, arena bermain, tempatpemancingan, dan fasilitas untuk kapal pesiar.
   c) *Residential Waterfront a*dalah perumahan, apartemen, dan resort yang dibangun di pinggir perairan. Lokasinya adalah sepanjang jalur *coastal road* yang berada di wilayah Nipah nipah, Sungai Parit, hingga wilayah pelabuhan penyeberangan ferry. Bahkan dalam perencanaan ke depan akan diperluas hingga ke Pantai Tanjung Jumlai. Penghubung yang direncanakan adalah Jembatan PPU – Balikpapan, Jalur Nipah nipah – Melawai, menghubungkan dua *Coastal Road* antar dua wilayah.
4. **Zona EMPAT** adalah zona yang meliputi wilayah pesisir pantai yang langsung menghadap dengan Selat Makassar, wilayah tersebut meliputi Kecamatan Babulu dan Waru yang secara khusus akan menjadi pengembangan sektor budidaya perikanan dan sejenisnya, termasuk juga akan dikembangkan sebagai sentral pertanian yang diharapkan akan jadi lumbung pangan bagi Kalimantan Timur.

E Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2019 ini menyajikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selama tahun 2019 berdasarkan perjanjan kinerja dan perbandingan dengan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya serta capaian terhadap kondisi akhir RPJMDsebagai tolak ukur keberasilan pemerintah daerah, dimana tahun 2019 ini merupakan tahun awal RPJMD 2018-2023.

Laporan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama ***(strategic issued)*** yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah dibelanjakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1). Perjanjian Kinerja Tahun 2019
2). Rencana Kinerja Tahun 2019
3). Pengukuran Kinerja Tahun 2019
4). Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2019

BAB II
Perencanaan Kinerja

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran serta bagaimana cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai dokumen resmi sudah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2019 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2019. Rencana Kinerja dalam Tahun 2019 berbentuk dokumen resmi yang disusun di awal Tahun 2019, yang merupakan Program Kerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

A Visi dan Misi

Sesuai dengan tugas dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan mandat, serta dengan melihat latar belakang dan mencermati isu-isu strategis yang berkembang, maka visi Kabupaten Penajam Paser Utaraadalah :

"Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara Yang Maju, Modern, dan Religius"

Penjabaran arti dari visi tersebut antara lain :

1. Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang **maju**
   Meningkatnya kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum.
2. Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang **modern**
   Mampu dan setara dalam menerapkan dan mensenergikan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat dengan kemajuan teknologi kekinian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
3. Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang **religius**

Mewujudkan kehidupan masyarakat sejajar, sederajat dan seimbang dunia dan akhirat menuju masyarakat berakhlak mulia, aman dan damai serta hidup berdampingan antara sesama pemeluk agama dilandaskan Lakumdinnukum Waliyadin dan Pancasila.

Misi untuk mencapai cita-cita dalam visi di tuangkan dalam 11 (sebelas) misi, yakni:

1. *Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran*
2. *Pembangunan infrastruktur & konektivitas kawasan serta industri terpadu*
3. *Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan*
4. *Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas.*
5. *Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan*
6. *Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan*
7. *Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman*
8. *Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas.*
9. *Menguatkan kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas.*
10. *Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah.*
11. *Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat Penajam Paser Utara yang maju, modern dan religius.*

B Tujuan dan Sasaran

Tabel di bawah ini menyajikan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel II.1 Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara

Misi	Tujuan	Sasaran
1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran	1 Peningkatan Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat	1 Meningkatkan perekonomian masyarakat
	2 Pengurangan angka pengangguran	2 Mengurangi angka pengangguran
2 Pembangunan infrastruktur & konektivitas kawasan serta industri terpadu	3 Peningkatan minat investasi didukung pembangunan infrastruktur	3 Meningkatkan investasi di kawasan industri
3 Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan	4 Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berkarakter	4 Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
		5 Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda
		6 Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4 Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas	5 Mewujudkan ketahanan pangan yang handal	7 Meningkatkan produktivitas sektor pertanian (dalam arti luas)
		8 Meningkatkan distribusi pangan
5 Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan	6 Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing	9 Meningkatkan daya saing daerah
		10 Meningkatkan kerjasama perekonomian

Misi	Tujuan	Sasaran
6 Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan	**7** Penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan desa dan kelurahan	**11** Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan kelurahan
7 Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman	**8** Memantapkan infrastruktur daerah	**12** Terwujudnya infrastruktur yang berwawasan lingkungan
	9 Mewujudkan penataan ruang yang berkesesuaian dengan RTRW	**13** Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan perumahan dan permukiman
	10 Membangun sistem pencegahan terhadap terjadinya bencana dan optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana	**14** Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana secara terpadu dan berkelanjutan
8 Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas	**11** Optimalisasi PAD	**15** Meningkatkan PAD dengan intensifikasi dan ektensifikasi
9 Menguatkan kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas	**12** Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	**16** Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
10 Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah	**13** Mengembangkan sistem informasi guna peningkatan layanan	**17** Tersedianya akses dan kualitas informasi publik berbasis web

Misi	Tujuan	Sasaran
11 Peningkatan kerukunan umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat Penajam Paser Utara yang maju, modern dan religius.	**14** Meningkatkan nilai-nilai luhur keagamaan	**18** Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama
	15 Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	**19** Meningkatnya penegakan peraturan perundang-undangan

C Indikator Kinerja, Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi RPJMD merupakan prioritas pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan yang dijabarkan ke dalam kebijakan tahunan yang harus dipedomani dalam menentukan prioritas pembangunan RKPD periode berkenaan. Strategi dan arah kebijakan RPJMD dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Daerah serta memedomani Prioritas Nasional.

Program pembangunan Daerah disusun dalam RPJMD untuk menggambarkan keterkaitan program Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.

Tabel II.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Kabupaten Penajam Paser Utara

Misi 1
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan perekonomian masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Pengembangan ekonomi masyarakat dengan perluasan lapangan kerja	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian ekonomi
Pengurangan angka pengangguran	Mengurangi angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terampil dengan kemampuan kreatifitas dan inovasi yang bersaing global	Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat kecil menengah
			Pelaksanaan perencanaan pembangunan secara sistematis dan terpadu Strategi	Pengembangan industri pengolahan produk lokal daerah
				Perluasan dan penyediaan lapangan kerja
				Meningkatkan kesempatan kerja serta mendorong mobilitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi pengangguran dengan mendorong pertumbuhan sektor industri, jasa, perdagangan dan penguatan UMKM
				Meningkatkan upaya perlindungan ketenagakerjaan serta harmonisasi hubungan industrial

Misi 2

Pembangunan infrastruktur & konektivitas kawasan serta industri terpadu

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan minat investasi didukung pembangunan infrastruktur	Meningkatkan investasi di kawasan industri	Nilai investasi	Pembangunan infrastruktur dasar di kawasan industiri Buluminung	Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar dan konektifitas daerah

Misi 3

Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berkarakter	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	Peningkatan kualitas pendidikan	Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Pembangunan ruang kelas belajar (RKB) beserta fasilitas pendukungnya
		Angka Harapan Hidup (Tahun)		Peningkatan akses pendidikan usia dini (PAUD)
	Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda	Jumlah Medali yang diperolah dalam berbagai event olahraga tingkat propinsi dan Nasional		Peningkatan kualitas tenaga pengajar
				Peningkatan bea siswa bagi pelajar dan mahasiswa
	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%) Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	Peningkatan kualitas kesehatan	Peningkatan layanan dasar kesehatan masyarakat
				Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta fasilitas pendukungnya
				Peningkatan kualitas tenaga kesehatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Pengembangan lingkungan sehat
				Peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

Misi 4

Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan ketahanan pangan yang handal	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	Peningkatan produksi pangan	Peningkatan produktifitas sektor pertanian, perikanan, dan peternakan
	Meningkatkan distribusi pangan	Pencapaian skor pola pangan harapan		Pemenuhan air baku irigasi
				Pengembangan teknologi dan mekanisasi pertanian
				Pengembangan kualitas petani

Misi 5

Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing	Meningkatkan daya saing daerah	Tingkat Kunjungan Wisata (orang)	Peningkatan produksi pertumbuhan ekonomi bidang agribisnis,agro industri, pariwisata, perdagangan dan jasa	Pengembangan produksi bidang agribisnis dan agro industri
		NTP		Penetapan dan pengembangan potensi wisata
		Peningkatan Jumlah WUB yang kompetetif		Peningkatan akses pariwisata beserta fasilitas pendukungnya
	Meningkatkan kerjasama perekonomian	Peningkatan Jumlah Perizinan yang tertangani		Peningkatan kerjasama investasi

Misi 6

Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan desa dan kelurahan	Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan kelurahan	Status Desa	Pengembangan ekonomi kerakyatan	Peningkatan iklim investasi
		Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan		Peningkatan stimulan UMKM
				Pemerataan pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan
		Persentase kemiskinan		Penguatan kelembagaan koperasi dan BUMDES

Misi 7

Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Memantapkan infrastruktur daerah	Terwujudnya infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik/Mantap	Peningkatan infrastruktur daerah dan pengelolaan lingkungan serta penataan ruang dan perumahan dan permukiman	Peningkatan infrastruktur dasar
		luas area daerah irigasi, daerah irigasi rawa (Ha)		
		Persentase pemukiman yang tertata		Meningkatkan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana
		Jumlah SPAM yang dikelola masyarakat		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Jumlah bangunan/gedung terbangun		Peningkatan pengelolaan lingkungan
		Penurunan angka kecelakaan darat dan perairan		
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Penataan ruang daerah
Mewujudkan penataan ruang yang berkesesuaian dengan RTRW	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang serta penataan perumahan dan permukiman	Pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya (%)		
		Luas lahan milik pemerintah yang telah bersertifikat		
Membangun sistem pencegahan terhadap terjadinya bencana dan optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana	Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan akibat bencana secara terpadu dan berkelanjutan	Prosentase meningkatnya kapasitas daerah melalui upaya pengurangan risiko bencana		Pengembangan perumahan dan permukiman yang layak
		Rata-rata waktu respon kejadian bencana		
		Prosentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pascabencana		
		Prosentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pascabencana		
		Terjaganya kawasan rawan kebakaran hutan		

Misi 8

Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Optimalisasi PAD	Meningkatkan PAD dengan intensifikasi dan ektensifikasi	Peningkatan PAD	Peningkatan pendapatan daerah	Optimalisasi pendapatan daerah
			Peningkatan potensi sumber-sumber PAD	Intensiikasi dan ekstensifikasi potensi sumber-sumber PAD

Misi 9

Menguatkan kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Predikat Akuntabilitas (LKIP)	Menguatkan kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas	Pelayanan publik yang prima dan penyederhanaan sistem birokrasi
				Penerapan standar, operasional dan pelaksanaan
				Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur

Misi 10

Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengembangkan sistem informasi guna peningkatan layanan	Tersedianya akses dan kualitas informasi publik berbasis web	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang berbasis Teknologi Informasi	Peningkatan layanan publik berbasis teknologi komunikasi dan informatika	Penyediaan layanan internet pada kantor pemerintahan termasuk kelurahan dan desa
				Penyediaan hotspot pada tempat pelayanan publik
				Penyebarluasan informasi

Misi 11

Peningkatan kerukuman umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat panajam paser utara yang maju, modern dan religius

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan nilai-nilai luhur keagamaan	Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Kasus/konflik yang bernuansa agama	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama melalui berbagai forum dialog sosial maupun ekonomi	1. Peningkatan keamanan dan ketertiban guna mendukung pelaksanaan beribadah 2. Optimalisasi lembaga sosial keagamaan yang ada dan berkembang di masyarakat
Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Meningkatnya penegakan peraturan perundang-undangan	Penurunan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		

D *Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah*

Tabel II.3 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara

Misi 1: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran			
Kebijakan Umum		**Program Pembangunan**	
1	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian ekonomi.	1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.
2	Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat kecil menengah.	2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha.
3	Pengembangan industri pengolahan produk lokal daerah.	3	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
4	Perluasan dan penyediaan lapangan kerja.	4	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
5	Meningkatkan kesempatan kerja serta mendorong mobilitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi pengangguran dengan mendorong pertumbuhan sektor industri, jasa, perdagangan dan penguatan UMKM Meningkatkan upaya perlindungan ketenagakerjaan serta harmonisasi hubungan industrial.	5	Peningkatan Kesempatan Kerja.

Misi 2: Pembangunan infrastruktur & konektivitas kawasan serta industri terpadu			
Kebijakan Umum		**Program Pembangunan**	
1	Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar dan konektifitas daerah.	1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
		2	Program Penataan Struktur Industri.
		3	Program Penataan Kawasan Strategis.
		4	Program Perencanaan Pembangunan Kota-kota Menengah dan Besar.
		5	Program Pembangunan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
Misi 3 : Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dasar dalam pemenuhan hak dasar masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan			
Kebijakan Umum		**Program Pembangunan**	
1	Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun.	1	Program Pendidikan Anak Usia Dini.
		2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
2	Pembangunan ruang kelas belajar (RKB) beserta fasilitas pendukungnya.	3	Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh.
		4	Program Pendidikan Non Formal.
3	Peningkatan akses pendidikan usia dini (PAUD).	5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
4	Peningkatan kualitas tenaga pengajar.	6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
5	Peningkatan bea siswa bagi pelajar dan mahasiswa.	7	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
		8	Program Peningkatan Layanan Perpustakaan.
6	Peningkatan layanan dasar kesehatan masyarakat.	9	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD.
7	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta fasilitas pendukungnya.	10	Program Peningatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.
		11	Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
8	Peningkatan kualitas tenaga kesehatan.	12	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
		13	Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
9	Pengembangan lingkungan sehat.	14	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
10	Peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.	15	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.
		16	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
		17	Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga.
		18	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
		19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga.
		20	Program Keluarga Berencana.
		21	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
		22	Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.
		23	Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak, melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat.
		24	Program Peningkatan Kualitas Keluarga.

Misi 4: Meningkatkan dan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas luas			
Kebijakan Umum		**Program Pembangunan**	
1	Peningkatan produktifitas sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.	1	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan.
		2	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.
2	Pemenuhan air baku irigasi.	3	Program Peningkatan Produksi.
3	Pengembangan teknologi dan mekanisasi pertanian.	4	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
		5	Program Pembangunan Usaha Perkebunan.
		6	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
4	Pengembangan kualitas petani.	7	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.
		8	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
		9	Program Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
		10	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
		11	Program Pengembangan Budidaya Perikanan.
		12	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar.
		13	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
		14	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan.
		15	Program Pembangunan Taman Laut Penajam.
		16	Program Peningaktan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan.
Misi 5: Mengakselerasi laju mesin-mesin pertumbuhan dalam proses produksi Agribisnis, Agroindustri, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa serta kerjasama lokal, regional, maju dan berkelanjutan			
Sasaran		**Program Pembangunan**	
1	Pengembangan produksi bidang agribisnis dan agro industri.	1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
		2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
		3	Program Pengembangan kemitraan pariwisata.
		4	Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
2	Penetapan dan pengembangan potensi wisata.	5	Program Pengembangan Nilai Budaya.
		6	Program peningkatan kesejahteraan petani.
3	Peningkatan akses pariwisata beserta fasilitas pendukungnya	7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.
		8	Program Produksi Hasi Peternakan.
4	Peningkatan kerjasama investasi.	9	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan/ Peternakan Lapangan.
		10	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
		11	Program Pembinaan Pedagang kaki Lima dan Asongan.
		12	Program Peningaktan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
		13	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

Sasaran		Program Pembangunan	
		14	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
		15	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
		16	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah.
		17	Program Pengembangan Logistik Hasil Perikanan.
		18	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
		19	Program Pengembangan Pengolahan, Diverifikasi Usaha dan Bina Mutu Produk.
		20	Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan.
Misi 6: Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan, melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan perdesaan dan kelurahan			
Sasaran		**Program Pembangunan**	
1	Peningkatan iklim investasi.	1	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan.
2	Peningkatan stimulan UMKM.	2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
3	Pemerataan pembangunan sarana dan prasarana desa dan kelurahan.	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
4	Penguatan kelembagaan koperasi dan BUMDES.	4	Program Bantuan dan Perlindungan Jaminan Sosial.
		5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.
		6	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.
		7	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
		8	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan.
		9	Program Pro-PPK-PPU.
		10	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
		11	Program Pendampingan Peningkatan Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Pedesaan.
		12	Program Penataan Daerah Otonomi Baru.
Misi 7: Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman			
Sasaran		**Program Pembangunan**	
1	Peningkatan infrastruktur dasar.	1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2	Meningkatkan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana.	2	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
3	Peningkatan pengelolaan lingkungan.	3	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
4	Penataan ruang daerah.		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
5	Pengembangan perumahan dan permukiman yang layak.	4	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
		5	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
		6	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
		7	Program pengendalian banjir

Sasaran		Program Pembangunan	
		8	Program penyediaan dan pengolahan air baku
		9	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
		10	Program Lingkungan Sehat Perumahan
		11	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
		12	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
		13	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
		14	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan
		15	Program pengelolaan areal pemakaman
		16	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
		17	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
		18	Program Pengembangan Perumahan
		19	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan
		20	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
		21	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
		22	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
		23	Program peningkatan pelayanan angkutan
		24	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
		25	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
		26	Pengadaan bangunan konservasi tanah dan air
		27	Program penanaman pohon pada lahan diluar kawasan
		28	Program Pembangunan Kawasan mangrove sebagai pusat restorasi
		29	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
		30	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		31	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
		32	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
		33	Penanaman Bambu Pada Kanan Kiri Sungai, Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA), Sekitar Mata Air dan Daerah Imbuhan Air Tanah
		34	Program perencanaan dan pengembangan Hutan
		35	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
		36	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		37	Program Perencanaan Tata Ruang
		38	Program Pemanfaatan Ruang
		39	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Sasaran		Program Pembangunan	
		40	Program Pengendalain Pemanfaatan Ruang
		41	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan (peningkatan kasus tanah yang terselesaikan)
		42	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
		43	Program Penataan, Kepemilikan, Pengguanaan dan Pemanfaatan Tanah
		44	Pogram Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan (terselesaikannya konflik-konflik pertanahan)
		45	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
		46	Program Penanggulangan Kebakaran
		47	Program Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan dan Pencegahan, Penyelamatan
		48	Program Perlindugnan dan Konservasi Sumberdaya Hutan
		49	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
		50	Program Kesiapsiagaan dan Pencegahan Dalam Menghadapi Bencana
		51	Program Pengendalian Penanganan Bencana
		52	Program Rekonstruksi Infrastruktur Sosial Ekonomi di Wilayah Pasca Bencana
		53	Program Pembangunan Daerah Rawan Bencana.
		54	Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong
		55	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
		56	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Misi 8: Peningkatan penerimaan daerah dan pengembangan sumber pendapatan non migas			
Sasaran		**Program Pembangunan**	
1	Optimalisasi pendapatan daerah Intensiikasi dan ekstensifikasi potensi sumber-sumber PAD.	1	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
Misi 9: Menguatkan kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berkualitas			
Sasaran		**Program Pembangunan**	
1	Pelayanan publik yang prima dan penyederhanaan sistem birokrasi.	1	Program Pengembangan Data/Informasi.
		2	Program Penataan Administrasi kependudukan.
		3	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan.
2	Penerapan standar, operasional dan pelaksanaan.	4	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.
		5	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.

Sasaran		Program Pembangunan	
3	Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur.	6	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
		7	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
		8	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
		9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
		10	Program Pengendalian Pembangunan Daerah.
		11	Program Kerjasama Pembangunan.
		12	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
		13	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
		14	Program Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kepegawaian.
		15	Program Penanganan Bidang hokum.
		16	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
		17	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.
Misi 10: Pengembangan sistem informasi yang handal dan modern dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan pemerintahan dan ekonomi daerah			
Sasaran		**Program Pembangunan**	
1	Penyediaan layanan internet pada kantor pemerintahan termasuk kelurahan dan desa.	1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
		2	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah.
		3	Program Sistem Data Gender dan Anak.
		4	Program Keluarga Berencana.
2	Penyediaan hotspot pada tempat pelayanan publik.	5	Program sistem PBDKI (Basis Data Keluarga Indonesia).
		6	Program sistem Pelaporan SR F/I/DALL dan F/ II/ KB.
3	Penyebarluasan informasi.	7	Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
		8	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
		9	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.
Misi 11: Peningkatan kerukuman umat beragama sebagai modal dan perekat kesatuan yang bertumpu pada solidaritas dan sinergitas untuk pembangunan menuju masyarakat Penajam Paser Utara yang maju, modern dan religius			
Sasaran		**Program Pembangunan**	
1	Peningkatan keamanan dan ketertiban guna mendukung pelaksanaan beribadah.	1	Program Pembinaan Keagamaan
		2	Program Peringatan Hari-hari Besar/Daerah/Lomba
		3	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
		4	Program ketahanan sosial dan ekonomi
		5	Program pendidikan politik masyarakat
2	Optimalisasi lembaga sosial keagamaan yang ada dan berkembang di masyarakat.	6	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
		7	Program pemeliharaan ketentraman, ketertiban perlindungan masyarakat dan pencegahan tindak criminal
		8	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

E Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Di Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menetapkan 12 (dua belas) sasaran dengan 30 (tiga puluh) indikator kinerja dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program yang akan dicapai dengan memanfaatkan Anggaran Belanja dan Pendapatan (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2019.

Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja yang akan dicapai di tahun 2019 sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Jumlah UKM Pertahun	50	UKM
		Persentase Koperasi Aktif	4	%
2	Mengurangi Angka Pengangguran	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Untuk Tenaga Kerja	80	Orang
		Persentase Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan	85	%
3	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	APK PAUD 3 – 6 Tahun	78	%
		Bertambahnya Lembaga PAUD Holistik Integratif	136	Lembaga
		Meningkatnya Jumlah Lembaga PAUD Berakreditasi B	100	Lembaga
		APM SD/MI	91,80	%
		APK SD/MI	100	%
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,02	%
		Angka Kelulusan SD/MI	99,98	%
		APM (SMP)N/MTs	81,10	%
		APK (SMP)N/MTs	100	%
		Angka Putus Sekolah (APS) (SMP)N/MTs	0,07	%
		Angka Kelulusan (SMP)N/MTs	99,82	%
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke (SMP)N/MTs	100	%
4	Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda	Jumlah Medali yang Diperoleh dalam Berbagai Event Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	2	Medali
		Jumlah Siswa yang Berprestasi SD/SMP	4	Siswa
		Jumlah Siswa SD/SMP yang Mengikuti Pembibitan dan Pembinaan	40	Siswa
		Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kompetensi Olahraga	3	Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
5	Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian	Rasio Penyuluh Peningkatan Sumber Daya Penyuluh Pertanian Bagi Pemberdayaan Petani	1 : 1	Rasio
6	Meningkatkan Kerjasama Perekonomian	PMA dan PMDN serta Nilai Investasi yang Diperoleh	PMA : Rp 12.500.000.000 PMDN : Rp 100.000.000.000	Rupiah
7	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Desa dan Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	80	%
8	Terwujudnya Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Terbangunnya Jaringan Jalan Kondisi Baik	43,45	Km
		Persentase Jalan yang Memiliki Drainase	19	%
9	Meningkatkan PAD dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Opini BPK	WTP	
		PAD	Rp 155.661.611.902	Rupiah
10	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Predikat Akuntabilitas (LKIP)	B	
11	Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik Berbasis Web	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi	38	Aplikasi
12	Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Tercapainya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	85	%

BAB III
Akuntabilitas Kinerja

Sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku pengemban tugas dan amanah masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019.

Pada Bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta beberapa langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
x > 85	Sangat Berhasil
75 < x ≤ 85	Berhasil
55 < x ≤ 75	Cukup Berhasil
x ≤ 55	Kurang Berhasil

A Capaian Kinerja Organisasi

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku pengemban amanah masyarakat, secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023, sebagaimana Tahun 2019 merupakan tahun awal RPJMD 2018-2023.

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019 sebanyak 12 sasaran dengan 31 indikator kinerja. Dari 31 indikator kinerja, sebanyak 26 indikator atau 83,87% dalam kriteria **Sangat Berhasil**, 1 indikator kinerja atau 3,23% masuk dalam kriteria **Cukup Berhasil**, dan 4 indikator kinerja atau 12,90% masuk dalam kriteria **Kurang Berhasil**.

Grafik III.1 Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2019

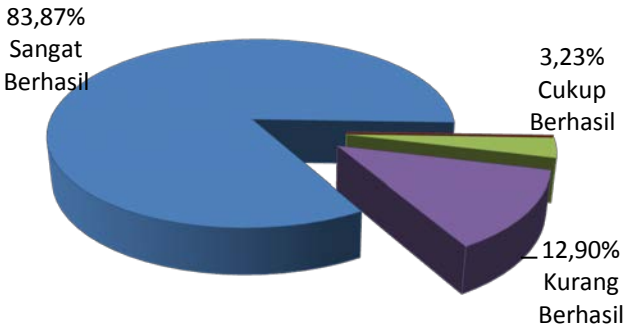

Selengkapnya capaian indikator kinerja Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	2019			
		Target		Realisasi	% Realisasi
1	Peningkatan Jumlah UKM Pertahun	50	UKM	58	116
2	Persentase Koperasi Aktif	4	%	26,05	651,25
3	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Untuk Tenaga Kerja	80	Orang	72	90
4	Persentase Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan	85	%	100	117,65
5	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
	- APK PAUD 3 – 6 Tahun	78	%	36	46,15
	- APK SD/MI	100	%	106,22	106,22
	- APK (SMP)N/MTs	100	%	112,44	112,44
6	Bertambahnya Lembaga PAUD Holistik Integratif	136	Lembaga	152	111,76
7	Meningkatnya Jumlah Lembaga PAUD Berakreditasi B	100	Lembaga	63	63
8	Angka Partisipasi Murni (APM)				
	APM SD/MI	91,80	%	95,58	104,12
	APM (SMP)N/MTs	81,10	%	89,16	109,94
9	Angka Putus Sekolah (APS)				
	- APS SD/MI	0,02	%	0,88	25
	- APS SMP N/MTs	0,07	%	1,70	4,12
10	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke (SMP)N/MTs	100	%	85,50	85,50

No	Indikator Kinerja	2019			
		Target		Realisasi	% Realisasi
11	Angka Kelulusan				
	- Angka Kelulusan SD/MI	99,98	%	100	100,02
	- Angka Kelulusan (SMP)N/MTs	99,82	%	100	100,18
17	Jumlah Medali yang Diperoleh dalam Berbagai Event Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	2	Medali	18	900
18	Jumlah Siswa yang Berprestasi SD/SMP	4	Siswa	39	975
19	Jumlah Siswa SD/SMP yang Mengikuti Pembibitan dan Pembinaan	40	Siswa	39	97,50
20	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	3	Kegiatan	3	100
21	Rasio Penyuluh Peningkatan Sumber Daya Penyuluh Pertanian Bagi Pemberdayaan Petani	1 : 1	Rasio	1 : 1	100
22	PMA dan PMDN serta Nilai Investasi yang Diperoleh	PMA : 12.500.000.000	Rupiah	PMA : 66.963.000.000	535,70
		PMDN : 100.000.000.000		PMDN : 1.007.135.600.000	1.007,14
23	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	80	%	76,42	95,53
24	Terbangunnya Jaringan Jalan Kondisi Baik	43,45	Km	94	216,34
25	Persentase Jalan yang Memiliki Drainase	19	%	21	110,53
26	Opini BPK	WTP		WTP	100
27	PAD	155.661.611.902	Rupiah	83.792.193.447,36	53,83
28	Predikat Akuntabilitas (LKjIP)	B		CC	97,67
29	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi	38	Aplikasi	38	100
30	Tercapainya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	85	%	100	117,65

SASARAN 1
Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2018		2019			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2019 Terhadap RPJMD (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Peningkatan Jumlah UKM Pertahun	22	UKM	50	58	116	200	29
2	Persentase Koperasi Aktif	21,88	%	4	26,05	651,25	5,97	436,35
Rata-rata Capaian Kinerja						**383,63**		**232,68**

Penerapan ekonomi kerakyatan diperlukan guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bentuk nyata dari ekonomi kerakyatan yaitu berupa dukungan partisipasi dari masyarakat dan dari pemerintah kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi.

Peningkatan Jumlah UKM Pertahun

Jumlah UKM yang terdata di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 sebanyak 2.458 yang tersebar di 4 Kecamatan terdiri dari : 1.459 UKM di Kecamatan Penajam, 223 UKM di Kecamatan Waru, 717 UKM di Kecamatan Babulu, dan 59 UKM di Kecamatan Sepaku. Jumlah UKM ini bertambah sebanyak 58 UKM dari Tahun 2018.

Upaya yang telah dilakukan :

a. Melakukan pendataan dan monitoring kepada pelaku UKM.
b. Melakukan Pembinaan dan penyuluhan berupa pelatihan manajemen kepada pelaku UKM.
c. Melakukan program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM berupa Penyelenggaraan Promosi Produk UKM.

Persentase Koperasi Aktif

Persentase Koperasi Aktif untuk Tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan, ditargetkan 4 persen terealisasi 26,05 persen. Di Tahun 2018 dari 256 koperasi yang ada terdapat 56 koperasi yang aktif, dan di Tahun 2019 bertambah menjadi 68 koperasi yang aktif dari 261 koperasi yang ada. Peningkatan ini disebabkan adanya dukungan data dari berbagai pihak dan program kegiatan pendampingan dari Dinas KUKM Perindag.

Tabel III.3 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016 - 2019

	Koperasi Terdaftar	Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif (%)
Tahun 2019	261	68	26,05
Tahun 2018	256	56	21,88
Tahun 2017	243	45	18,52
Tahun 2016	243	99	40,74

Upaya yang telah dilakukan antara lain :

a. Melakukan pendataan dan monitoring kepada semua koperasi yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara.
b. Melakukan pembinaan kepada koperasi yang terdata sehingga koperasi dapat menghasilkan produk unggulan daerah yang mampu bersaing secara kualitas dan kuantitas di pasaran.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis "MeningkatkanPerekonomian Masyarakat", yaitu :

1. Pengembangan Wilayah Transmigrasi
2. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
5. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
6. Program Penataan Struktur Industri

SASARAN 2

Mengurangi Angka Pengangguran

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2018	2019			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Untuk Tenaga Kerja	115 Orang	80	72	90	450	16
2	Persentase Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan	100 Persen	85	100	117,65	97	103,09
Rata-rata Capaian Kinerja					**103,83**		**59,55**

Pengangguran dapat disebabkan oleh minimnya kualitas, baik dari sisi pendidikan maupun keterampilan kelompok angkatan kerja, serta masalah ketenagakerjaan yang dapat memicu penganguran. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

1. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan untuk Tenaga Kerja

Pendidikan dan Pelatihan untuk tenaga kerja bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pekerjaan.

Pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengirimkan 21 orang tenaga kerja untuk dilatih di BBPLK Medan dan BBPLK Serang yang dibiayai oleh APBN, dimana jumlah peserta pelatihannya ditentukan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian Pendidikan dan Pelatihan Kerja Berbasis Kewirausahaan yang dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 15 orang, Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Teknik Pendingin yang dilaksanakan di BLK Samarinda sebanyak 16 orang, serta pendidikan dan pelatihan keterampilan menjahitdi Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga jumlah tenaga kerja yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan di Tahun 2019 sebanyak 72 orang. Jumlah ini berkurang sebanyak 43 dari Tahun 2018. Capaian indikator kinerja Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan untuk Tenaga Kerja mencapai 72 orang dari yang ditargetkan 80 orang, sehingga persentasenya 90 %.

2. Persentase Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan

Kasus ketenagakerjaan yang paling banyak terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah PHI/PHK dan mogok kerja atau unjuk rasa. Selama Tahun 2019 terjadi 5 (lima) kasus PHI/PHK dan mogok kerja/ unjuk rasa, semuanya dapat terselesaikan melalui kegiatan deteksi dini dan pencegahan PHI/PHK, mogok kerja/ unjuk rasa, dan melalui kegiatan pembinaan dan penyelesaian kasus PHI/PHK, mogok kerja/ unjuk rasa. PHI/ PHK yang terjadi umumnya disebabkan oleh kurangnya kedisiplinan karyawan, masa kontrak kerja karyawan yang telah habis, serta karyawan yang melanggar aturan perusahaan, sedangkan mogok kerja/ unjuk rasa disebabkan oleh tuntutan hak karyawan yang belum diberikan oleh perusahaan seperti yang ditentukan dalam aturan perusahaan tempat karyawan bekerja.

Capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan ini tercapai 100 % melebihi yang ditargetkan 85 %, sehingga pesentase capaiannya sebesar 117,65 %.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis "Mengurangi Angka Pengangguran", yaitu :

1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
3. Peningkatan Kesempatan Kerja

SASARAN 3

Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2018		2019			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023 Terhadap RPJMD (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)							
	- PAUD 3 – 6 Tahun	-	Persen	78	36	46,15	81,50	44,17
	- APK SD/MI	114,11	Persen	100	106,22	106,22	100	106,22
	- APK (SMP)N/MTs	97,02	Persen	100	112,44	112,44	100	112,44
2	Bertambahnya Lembaga PAUD Holistik Integratif	152	Lembaga	136	152	111,76	177	85,88
3	Meningkatnya Jumlah Lembaga PAUD Berakreditasi B	56	Lembaga	100	63	63	200	31,50
4	Angka Partisipasi Murni (APM)							
	- SD/MI	98,41	Persen	91,80	95,58	104,12	90	106,20
	- SMP N/MTs	58,21	Persen	81,10	89,16	109,94	80	111,45
5	Angka Putus Sekolah (APS)							
	- SD/MI	0,33	Persen	0,02	0,88	25	0,01	1,14
	- SMPN/MTs	0,98	Persen	0,07	1,70	4,12	0,06	3,53
6	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke (SMP)N/MTs	91,79	Persen	100	85,50	85,50	100	85,50
7	Angka Kelulusan							
	- SD/MI	100	Persen	99,98	100	100,02	100	100
	- SMPN/MTs	100	Persen	99,82	100	100,18	99,90	100,10
Rata-rata Capaian Kinerja						**80,70**		**74,01**

1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai jenjang. Angka Partisipasi Kasar (APK) betujuan untuk mengetahui efisiensi pelayanan pendidikan dan daya tampung yang berdampak pada mutu pendidikan. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan.

- Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 3 -6 Tahun

Sebagaimana diketahui, Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2019 secara nasional sebesar 37,43%. Kabupaten Penajam Paser Utara sendiri memiliki Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2019 sebesar 36%, artinya anak usia 3 – 6 Tahun di Kabupaten Penajam Paser Utara yang masuk sekolah di jenjang PAUD hanya 36%. Rendahnya APK PAUD ini salah satunya disebabkan oleh akses layanan PAUD yang masih terbatas dan sebagian besar jauh dari jangkauan.

- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI

Jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 usia 7 – 12 tahun sebanyak 20.631 jiwa dengan jumlah siswa SD/ MI 21.915 siswa, sehingga diperoleh nilai APK sebesar 106,22 persen. Capaian Kinerja dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI pada Tahun 2019 melebihi target sebesar 6,22 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018, terjadi peningkatan sebesar 7,89 persen di Tahun 2019 yang disebabkan oleh banyaknya siswa pendatang di jenjang SD/MI.

Tabel III.4 Persentase Capaian APK SD/ MI Kabupaten Terhadap APK Nasional

	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI		Persentase Capaian Kabupaten Penajam Paser Utara (%)
	Kabupaten Penajam Paser Utara	Nasional	
Tahun 2019	106,22	107,46	98,85
Tahun 2018	114,11	108,61	105,06
Tahun 2017	95,58	108,50	88,09
Tahun 2016	95,41	109,31	87,28

- **Angka Partisipasi Kasar (APK) (SMP)N/ MTs**

Jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara usia 13 – 15 tahun sebanyak 8.106 jiwa dengan jumlah siswa SMP N/ MTs 9.114 siswa, sehingga dipeoleh Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP N/ MTs sebesar 112,44 persen.

Capaian Kinerja dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) (SMP)N/ MTs pada Tahun 2019 melebihi target sebesar 12,44 persen dengan realisasi capaian sebesar 112,44 persen atau termasuk dalam kategori kinerja sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan Tahun 2018, terjadi peningkatan sebesar 15,42 persen.

Tabel III.5 Persentase Capaian APK SMP N/ MTs Kabupaten Terhadap APK Nasional

	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP N/ MTs		Persentase Capaian Kabupaten Penajam Paser Utara (%)
	Kabupaten Penajam Paser Utara	Nasional	
Tahun 2019	112,44	90,57	124,15
Tahun 2018	97,02	91,52	106,01
Tahun 2017	83,85	90,23	92,93
Tahun 2016	78,70	90,12	87,33

2. Bertambahnya Lembaga PAUD Holistik Integratif

PAUD Holistik Integratif adalah penanganan anak usia dini secara utuh (menyeluruh) yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, dan perlindungan, untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah daerah, dan pusat.

Tujuan PAUD Holistik Integratif, secara umum adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia; sedangkan secara khusus adalah:

1. Terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini.
2. Terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada.
3. Terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah.
4. Terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Tabel III.6 Jumlah Lembaga PAUD Tahun 2017 - 2019

Kecamatan	Jumlah PAUD		
	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Penajam	73	74	74
Sepaku	27	28	28
Waru	16	16	16
Babulu	40	34	34
	156	152	152

Di Tahun 2019 Lembaga PAUD Holistik Integratif di Kabupaten Penajam Paser Utara tidak ada penambahan dari Tahun 2018, dimana Lembaga PAUD Holistik Integratif sebanyak 152 PAUD. Indikator kinerja ini melebihi dari target yang ditetapkan dengan realisasi capaian indikator ini sebesar 111,76 persen.

3. Meningkatnya Jumlah Lembaga PAUD Berakreditasi B

Lembaga PAUD harus benar-benar melaksanakan peran dan fungsinya sebagai lembaga yang memiliki andil besar dalam menentukan masa depan bangsa melalui pendidikan usia dini. Untuk itu sebagai upaya menjamin mutu dan layanan PAUD, pemerintah menyelenggarakan program akreditasi lembaga PAUD yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Pada Tahun 2019 jumlah lembaga PAUD yang telah berakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional PAUD Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 63 PAUD dari 152 PAUD yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara, bertambah 7 lembaga PAUD dari Tahun 2018. Capaian indikator kinerja ini belum mencapai target yang ditetapkan, dengan realisasi capaian sebesar 63 persen.

4. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perhitungan dari jumlah siswa sesuai jenjang pendidikan dibanding jumlah penduduk kelompok usia sekolah sesuai jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu.

- **Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI**

Capaian kinerja dari Angka Partisipasi (APM) SD/MI pada Tahun 2019 melebihi target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan Angka Partisipasi Murni (APM) Nasional SD/ MI, Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Penajam Paser Utara jenjang SD/ MI belum mencapai APM Nasional karena terjadinya penurunan APM SD/ MI Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 sebesar 2,83 persen yang disebabkan oleh adanya siswa yang mengikuti sekolah di luar satuan pendidikan.

Tabel III.7 Persentase Capaian APM SD/ MI Kabupaten Terhadap APM Nasional

	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI		Persentase Capaian Kabupaten Penajam Paser Utara (%)
	Kabupaten Penajam Paser Utara	Nasional	
Tahun 2019	95,58	97,64	97,89
Tahun 2018	98,41	97,58	100,85
Tahun 2017	81,78	97,19	84,14
Tahun 2016	78,10	96,82	80,67

- **Angka Partisipasi Murni (APM) SMP N/ MTs**

Capaian kinerja dari Angka Partisipasi (APM) SMP N/MTs pada Tahun 2019 melebihi target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan Angka Partisipasi Murni (APM) Nasional SMP/ MTs, Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Penajam Paser Utara jenjang SMP/ MTs sudah melebihi APM Nasional.

Tabel III.8 Persentase Capaian APM SMP N/ MTs Kabupaten Terhadap APM Nasional

	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP N/ MTs		Persentase Capaian Kabupaten Penajam Paser Utara (%)
	Kabupaten Penajam Paser Utara	Nasional	
Tahun 2019	89,16	79,40	112,29
Tahun 2018	58,21	78,84	73,83
Tahun 2017	67,33	78,40	85,88
Tahun 2016	65,26	77,95	83,72

5. Angka Putus Sekolah (AP)

Angka Putus Sekolah (AP) merupakan perhitungan dari jumlah putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah siswa tahun sebelumnya pada jenjang pendidikan yang sama. Angka Putus Sekolah (AP) dari data masing-masing sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara, belum mencapai sesuai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya siswa yang pindah sekolah di luar

Kabupaten Penajam Paser Utara tanpa melaporkan kepindahannya ke pihak sekolah atau ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.

Grafik III.2 Angka Putus Sekolah Tahun 2018- 2019

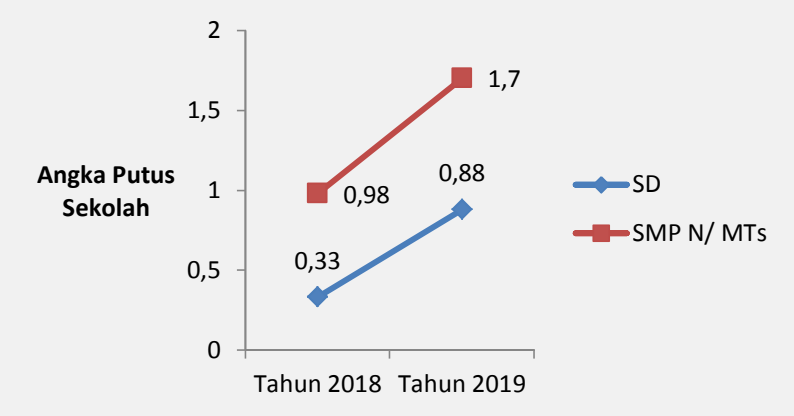

- **Angka Putus Sekolah (AP) SD/MI**

Angka Putus Sekolah (AP) SD/ MI mengalami peningkatan di Tahun 2019 sebesar 0,55 persen dibandingkan dengan Tahun 2018. Capaian kinerja indikator Angka Putus Sekolah (AP) SD/ MI belum mencapai sesuai targetkan, dengan capaian kinerja 25 persen.

- **Angka Putus Sekolah (AP) SMP N/ MTs**

Jika dibanding dengan Tahun 2018, Angka Putus Sekolah (AP) SMP/ MTs mengalami peningkatan di Tahun 2019 sebesar 0,75 persen. Capaian kinerja indikator Angka Putus Sekolah (AP) SD/ MI belum mencapai sesuai targetkan, dengan capaian kinerja 4,12 persen.

6. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMPN/MTs

Angka Melanjutkan (AM) adalah persentase jumlah lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/ MI ke SMP N/ MTs diperoleh dengan menghitung jumlah siswa baru kelas 1 (satu) pada jenjang SMP N/ MTs dibandingkan dengan jumlah lulusan pada jenjang SD/ MI tahun ajaran sebelumnya.

Grafik III.3 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP N/ MTs

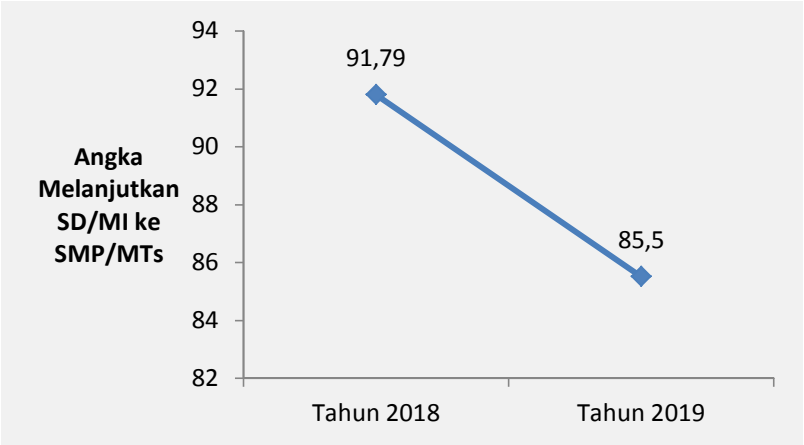

Pada Tahun 2019 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/ MI ke SMP N/ MTs sebesar 85,50 persen, belum mencapai 100 persen seperti yang ditargetkan. Hal ini disebabkan oleh adanya siswa yang memilih melanjutkan mengenyam pendidikan di pondok pesantren, dan adanya yang memilih untuk berhenti melanjutkan bersekolah dengan alasan membantu orang tua bekerja.

7. Angka Kelulusan

Angka Kelulusan adalah persentase jumlah siswa tingkat tertinggi dari jenjang pendidikan tertentu yang lulus. Angka Kelulusan diperoleh dengan menghitung jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah siswa tingkat tertinggi tahun sebelumnya pada tingkat pendidikan tertentu.

- **Angka Kelulusan SD/MI**

Angka Kelulusan pada jenjang SD/ MI pada Tahun 2019 dan Tahun 2018 telah tercapai 100 persen dengan capaian kinerja melebihi dari yang ditargetkan. Dengan target 99,98 persen, realisasi 100 persen sehingga persentase capaiannya 100,02 persen.

- **Angka Kelulusan SMPN/MTs**

Angka Kelulusan pada jenjang SMP N/ MTs pada Tahun 2019 dan Tahun 2018 juga telah tercapai 100 persen dengan capaian kinerja melebihi dari yang ditargetkan. Dengan target 99,82 persen, realisasi 100 persen sehingga persentase capaiannya 100,18 persen.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja", yaitu:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3. Program Pendidikan Non Formal
4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
6. Program peningkatan peran serta kepemudaan
7. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
8. Program peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga
9. Program Pengembangan dan Manajemen Kepemudaan
10. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
11. Program Peningkatan Layanan Perpustakaan
12. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
13. Peningkatan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
14. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
15. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
17. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
18. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
19. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
21. Program Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kepegawaian
22. Program Penataan Sistem Manajemen Aparatur
23. Program Penataan Akuntabilitas Kinerja
24. Program Penataan dan Penguatan Organisasi
25. Program Kerjasama Masalah Peraturan Perundang-Undangan
26. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

SASARAN 4
Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2018		2019			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2019 Terhadap RPJMD (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Jumlah Medali yang Diperoleh dalam Berbagai Event Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	1	Medali	2	18	900	3	66,67
2	Jumlah Siswa yang Berprestasi SD/SMP	22	Siswa	4	39	975	6	650
3	Jumlah Siswa SD/SMP yang Mengikuti Pembibitan dan Pembinaan	21	Siswa	40	39	97,50	60	65
4	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	2	Kegiatan	3	3	100	4	75
Rata-rata Capaian Kinerja						**518,13**		**214,7**

1. Jumlah Medali yang Diperoleh dalam Berbagai Event Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional

Capaian kinerja untuk indikator ini pada Tahun 2019 melebihi dari target yang ditetapkan. Target Jumlah Medali yang Diperoleh dalam Berbagai Event Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional 2 medali, tercapai 18 medali. Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yang hanya memperoleh 1 medali.

2. Jumlah Siswa yang Berprestasi SD/SMP

Capaian Jumlah Siswa yang Berprestasi SD/ SMP pada Tahun 2019 sebesar 975 persen. Dibandingkan dengan Tahun 2018, realisasi di Tahun ini menurun. Dari target 4 siswa yang berprestasi, terealisasi 39 siswa. Siswa yang berprestasi ini adalah siswa yang berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik.

3. Jumlah Siswa SD/SMP yang Mengikuti Pembibitan dan Pembinaan

Pembibitan dan pembinaan siswa secara berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan prestasi siswa baik dalam bidang akademik maupun non akademik.

Sekolah jenjang SD dan SMP di Kabupaten Penajam Paser Utara telah melakukan pembibitan dan pembinaan siswa yang berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik yang dipersiapkan untuk berbagai *event* kompetisi tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Jumlah siswa SD/ SMP yang mengikuti pembibitan dan pembinaan di Tahun 2019 sebanyak 39 siswa yang terdiri dari 21 siswa dalam bidang akademik dan 18 siswa dalam bidang non akademik. Jumlah ini bertambah 18 siswa jika dibandingkan dengan Tahun 2018. Capaian indikator ini sebesar 97,50 persen, dimana dari target 40 siswa terealisasi sebanyak 39 siswa. Pembinaan dan pembibitan yang dilakukan dalam bidang non akademik, yaitu pembibitan dan pembinaan atlet sepak bola.

4. Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Kegiatan olahraga tidak lepas dengan adanya kompetisi baik berupa pertandingan maupun perlombaan cabang olahraga. Penyelenggaraan kompetisi olahraga bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga, menjaring bibit atlet yang

potensial, serta memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, olahraga juga bermanfaat bagi anak, yaitu; agar anak terbiasa bekerja keras, mengembangkan keyakinan diri, belajar bekerjasama dalam tim, serta menginspirasi anak untuk menjadi yang terbaik.

Di Tahun 2019, kegiatan penyelenggaraan kompetisi olahraga sebanyak 3 kegiatan mencapai sesuai dengan yang ditargetkan 3 kegiatan, sehingga realisasi capaiannya sebesar 100 persen. Adapun 3 kegitan kompetisi olahraga yang terselenggara yaitu:

1. Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Kabupaten.
2. Kegiatan Kapasitas Guru Olahraga SD dan SMP.
3. Kegiatan Gala Siswa Indonesia (GSI).

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis "Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda", yaitu :

1. Program peningkatan peran serta kepemudaan
2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
3. Program peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga

SASARAN 5

Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2018		2019			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2019 Terhadap RPJMD (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Rasio Penyuluh Peningkatan Sumber Daya Penyuluh Pertanian Bagi Pemberdayaan Petani	1 : 2		1 : 1	1 : 1	100	1 : 1	100
Rata-rata Capaian Kinerja						100		100

Rasio Penyuluh Peningkatan Sumber Daya Penyuluh Pertanian Bagi Pemberdayaan Petani

Ketersediaan tenaga penyuluh pertanian merupakan salah satu penunjang keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan produksi pangan, merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan keluarga petani dan rakyat desa, serta mengusahakan pertanian yang berkelanjutan.

Pengukuran indikator ini bertujuan agar semua petani, peternak atau pekebun di semua desa/ kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat terbantu dalam mengembangkan wawasannya agar mengetahui dan mempunyai kemauan serta mampu memecahkan masalahnya sendiri dalam usaha atau kegiatan-kegiatan meningkatkan hasil usahanya dan tingkat kehidupannya.

Pada Tahun 2019 jumlah penyuluh di Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 59 orang yang tersebar di 54 desa/ kelurahan, sehingga rasio penyuluh pertanian terhadap desa 1 : 1. Setiap penyuluh menangani tiga sektor yaitu pertanian, peternakan, dan perkebunan.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis "Menurunnya Tingkat Kemiskinan", yaitu :

1. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
2. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan/peternakan lapangan
3. Program Pengembangan Usaha Perkebunan
4. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
5. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

SASARAN 6
Meningkatkan Kerjasama Perekonomian

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2018	2019			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2019 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	PMA dan PMDN serta Nilai Investasi yang Diperoleh	PMA : Rp 13.884.277.863,57	PMA : Rp 12.500.000.000	PMA : Rp 66.963.000.000	535,70	PMA : Rp 87.500.000.000	76,53
		PMDN : Rp 315.473.800.000	PMDN : Rp 100.000.000.000	PMDN : Rp 1.007.135.600.000	1.007,14	PMDN : Rp 1.000.000.000.000	100,71
Rata-rata Capaian Kinerja					**771,42**		**88,62**

PMA dan PMDN serta Nilai Investasi yang Diperoleh

Nilai investasi PMA dan PMDN berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tahun 2019 mengalami peningkatan dari Tahun 2018. Capaian indikator kinerja ini juga mencapai melebihi dari target yang ditetapkan, dengan hasil yang sangat memuaskan. Target PMA Rp 12.500.000.000 di Tahun 2019, terealisasi Rp 66.963.000.000,00 sehingga capaiannya 535,7 persen.

Sementara itu nilai investasi PMDN Tahun 2019 sebesar 1.007.135.600.000. Jika dibandingkan dengan nilai investasi PMDN Tahun 2018, mengalami peningkatan Rp 691.661.800.000 di Tahun 2019.

Kenaikan nilai investasi PMA dan PMDN ini merupakan wujud semakin tingginya kesadaran perusahaan untuk menyampaikan capaian kegiatan penanaman modal dan sebagai wujud keberhasilan pembinaan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap pelaku usaha untuk menyampaikan data laporan kegiatan penanaman modalnya.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis "Meningkatkan Kerjasama Perekonomian", yaitu :

1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
3. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

SASARAN 7
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Desa dan Kelurahan

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2018	2019			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2019 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	67,86 %	80	76,42	95,53	100	76,42
Rata-rata Capaian Kinerja					**95,53**		**76,42**

Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara senantiasa menunjukkan komitmen dalam membangun infrastruktur daerah Penajam Paser Utara dengan mengaplikasikan berbagai ide inovasi sebagai percepatan pembangunan infrastruktur demi tersedianya pelayanan publik yang memadai. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sejak Tahun 2013 mendirikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum di tingkat kecamatan untuk menyelesaikan kendala infrastuktur di

desa dan kelurahan sehingga mempersingkat jalur birokrasi yang panjang.

Tahun 2019 Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan meningkat 8,56 persen dari Tahun 2018. Capaian indikator ini tidak mencapai target yang ditetapkan karena adanya sharing dana dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, dan Kelompok Tani, sehingga penyerapan material bangunan tidak terlalu besar.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis "Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Desa dan Kelurahan", yaitu :

1. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
4. Program Bantuan dan Perlindungan Jaminan Sosial
5. Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat pedesaan
6. Program Partisipasi masyarakat dalam membangun desa
7. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
8. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
9. Program Pro-PPK-PPU
10. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
11. Program Pendampingan peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat perdesaan
12. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

SASARAN 8

Terwujudnya Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2018	2019			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Terbangunnya Jaringan Jalan Kondisi Baik	109,8 Km	43,45	94	216,34	720,73	13,04
2	Persentase Jalan yang Memiliki Drainase	15 %	19	21	110,53	61	34,43
Rata-rata Capaian Kinerja					**163,44**		**23,73**

1. Terbangunnya Jaringan Jalan Kondisi Baik

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Terbangunnya Jaringan Jalan Kondisi Baik Tahun 2019 terealisasi sepanjang 94 Km. Pemeliharaan jalan pada Tahun 2019, Dinas PU dan PR telah melakukan pemeliharaan jalan sepanjang 29 Km.

Capaian Kinerja pada Tahun 2019 sebesar 216,34 persen melebihi dari target yang ditetapkan karena adanya anggaran dari sisa pembayaran kegiatan multi years sehingga pembangunan jalan dalam kondisi baik bertambah.

2. Persentase Jalan yang Memiliki Drainase

Melindungi jalan dari air permukaan dan air tanah merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan jalan. Pentingnya drainase jalan harus mendapat perhatian khusus sebelum melakukan pembangunan jalan.

Jalan yang telah memiliki drainase di Kabupaten Penajam Paser Utara telah mencapai 21 persen di Tahun 2019, bertambah 4 persen dari Tahun 2018. Target 19 persen di Tahun 2019 dapat terealisasi 21 persen sehingga capaian kinerjanya sebesar 110,53 persen.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis "Terwujudnya Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan", yaitu :

1. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
2. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
3. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
4. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
5. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
6. Program pengendalian banjir
7. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
8. Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan
9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
10. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
11. Program penyediaan dan pengolahan air baku
12. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
13. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
14. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
15. Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
17. Program peningkatan pelayanan angkutan
18. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
19. Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

SASARAN 9

Meningkatkan PAD dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2018	2019			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2019 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
2	PAD	Rp 103.409.631.832,64	Rp 155.661.611.902	Rp 83.792.193.447,36	53,83	Rp 1.364.708.196.224	6,14
Rata-rata Capaian Kinerja					**76,92**		**53,07**

1. Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemeringah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dijadikan indikator dalam menilai pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam mengelola keuangan daerah yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018 yang diserahkan pada Tahun 2019, BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian WTP ini merupakan pencapaian tahun ketiga sebagai wujud upaya dan komitmen untuk mengelola keuangan daerah dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, dan transparan.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Grafik III.4 PAD Tahun 2016 - 2019

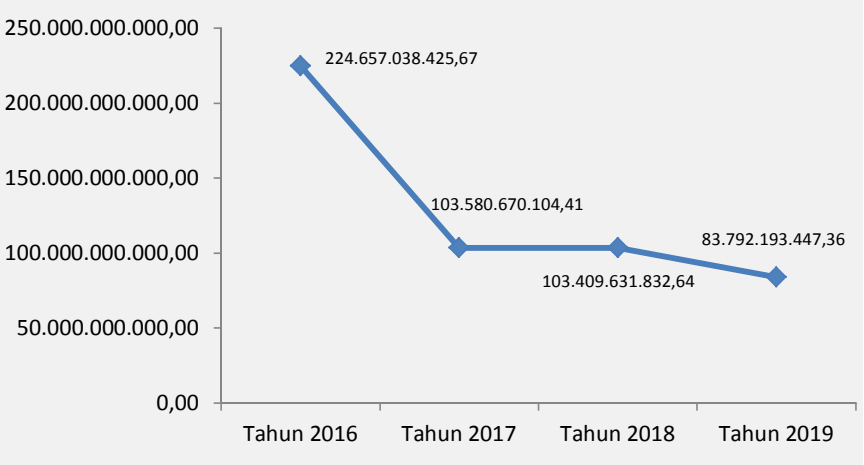

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 sebesar Rp 83.792.193.447,36, menurun Rp 19.617.438.385,28 dari PAD Tahun 2018 sebesar 103.409.631.832,64. Capaian indikator kinerja peningkatan PAD ini terealisasi 53,83 persen dari target yang ditetapkan disebabkan oleh tidak tercapainya realisasi pajak hiburan dan pajak sarang burung walet, dimana kurangnya kesadaran pemilik hiburan dan sarang burung walet untuk membayar pajak.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis "Meningkatan PAD dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi", yaitu :

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

SASARAN 10

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2018	2019			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2019 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Predikat Akuntabilitas (LKjIP)	CC	B	CC	97,67	B	97,67
Rata-rata Capaian Kinerja					**97,67**		**97,67**

Predikat Akuntabilitas (LKjIP)

Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan PAN dan RB) memberikan nilai 58,61 dengan kriteria CC dari hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai berfungsinya implementasi danpengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil penilaian Tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding Tahun 2017, dimana Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memperoleh nilai 57,14. Hal ini menunjukkan bahwa telah terdpat kemajuan terhadap penerapan sistem akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaran pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis "Meningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik", yaitu :

1. Program Pengendalian Pembangunan Daerah
2. Penataan Administrasi Kependudukan
3. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
4. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
5. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
7. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
8. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
10. Program Pengendalian Pembangunan Daerah
11. Program Kerjasama Pembangunan
12. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
13. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
14. Program Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kepegawaian
15. Program Penanganan Bidang Hukum
16. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

17. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

SASARAN 11

Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik Berbasis Web

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2018		2019			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2019 Terhadap RPJMD (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi	38	Aplikasi	38	38	100	68	59,38
Rata-rata Capaian Kinerja						100		59,38

Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi

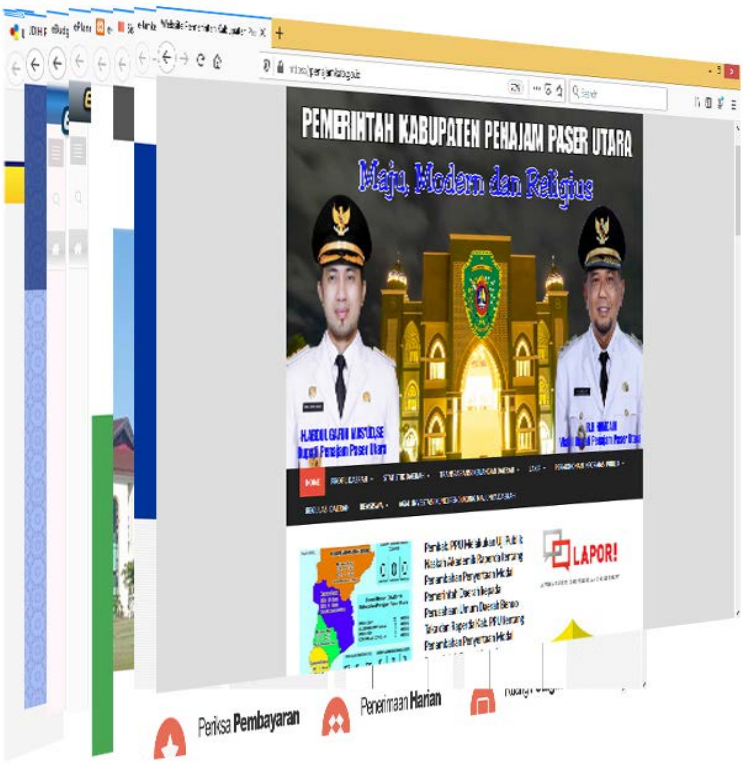

Paradigma pelayanan publik berkembang dengan fokus pengelolaan yang berorientasi pada kepuasanpelanggan (*customer-driven government*), hal ini sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan negara dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima dan berkualitas. Prinsip - prinsip pelayanan publik digunakan sebagai upaya peningkatan kualitas di dalam penyediaan pelayanan pada sektor publik termasuk dalam hal ini adalah sebagai dasar pengembangan *e-government*.

Untuk meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah berusaha membuat dan mengembangkan berbagai aplikasi yang

menyajikan berbagai data dan informasi yang memberikan kemudahan dalam aksesibilitas.

Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah memiliki 38 aplikasi layanan publik. Namun, optimalisasi atas aplikasi layanan publik ini belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu manajemen jaringan, sehingga mengakibatkan kurangnya kontrol atas pemakaian serta pemeliharaan aplikas tersebut.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis "Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik Berbasis Web", yaitu :

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
3. Program Sistem Data Gender dan Anak
4. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam KBKR yang mandiri
5. Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
7. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

SASARAN 12

Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2018	2019			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2019 Terhadap RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Tercapainya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	66,67 %	85	100	117,65	90	111,11
Rata-rata Capaian Kinerja					**117,65**		**111,11**

Tercapainya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Capaian indikator kinerja Tercapainya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada Tahun 2019 terealisasi 100 persen, melebihi dari yang ditargetkan 85 persen. Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada di Tahun 2019 sebanyak

51 pelanggaran, meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yang terdapat 21 pelanggaran. Pelanggaran di Tahun 2019 paling banyak terkait Izin Mendirikan Bangunan. Masih banyaknya jumlah pelanggaran Perda dan Perkada di Tahun 2019 dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan Perda dan Perkada.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pelanggaran Perda dan Perkada, yaitu:

1. Melaksanakan deteksi dini potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2. Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat.
3. Menjalin kerjasama antar instansi dan lembaga terkait pelanggaran Perda dan Perkada.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis "Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang-Undangan", yaitu :

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
2. Program pemeliharaan ketentraman, ketertiban perlindungan masyarakat dan pencegahan tindak kriminal
3. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
4. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Hasil capaian kinerja sasaran yang dicapai pada Tahun 2019 secara umum dapat mencapai target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dari 12 sasaran yang ditargetkan, tercapai dengan rentang capaian kinerja sasaran bervariasi. Rata-rata nilai capaian kinerja sasaran sebesar 217,41 persen dengan interpretasi "***sangat berhasil***". Perolehan rata-rata nilai kinerja tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel III.9 Perolehan Capaian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019

Tujuan	Sasaran	Rata-rata Capaian Tahun 2019 (%)	Interpretasi
Peningkatan Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	383,63	**Sangat Berhasil**
Pengurangan angka pengangguran	Mengurangi Angka Pengangguran	103,83	**Sangat Berhasil**
Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berkarakter	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	80,70	**Berhasil**
Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berkarakter	Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda	518,13	**Sangat Berhasil**
Mewujudkan ketahanan pangan yang handal	Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian	100	**Sangat Berhasil**
Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing	Meningkatkan Kerjasama Perekonomian	771,42	**Sangat Berhasil**
Penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan desa dan kelurahan	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Desa dan Kelurahan	95,53	**Sangat Berhasil**
Memantapkan infrastruktur daerah	Terwujudnya Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	163,44	**Sangat Berhasil**
Optimalisasi PAD	Meningkatkan PAD dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi	76,92	**Berhasil**
Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	97,67	**Sangat Berhasil**
Mengembangkan sistem informasi guna peningkatan layanan	Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik Berbasis Web	100	**Sangat Berhasil**
Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	117,65	**Sangat Berhasil**
Rata-rata Nilai Capaian Kinerja		**217,41**	**Sangat Berhasil**

B Realisasi Anggaran

Efektivitas dan efisiensi alokasi belanja Negara dengan mengacu kepada penerapan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*). Belanja daerah digunakan untuk mendukung berbagai agenda kebijakan strategis dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Belanja daerah diutamakan pada program prioritas yang mendesak untuk segera dilaksanakan berupa agenda pembangunan yang mempunyai dampak terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Ikhtisar laporan realisasi anggaran yang merupakan akuntabilitas keuangan dapat digambarkan sebagai berikut :

APBD Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2019 sebesar Rp 1.649.765.942.056,00 dengan rincian sebagai realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp 1.606.774.948.876,21 dan realisasi belanja sebesar Rp 1.559.379.590.168,24 sehingga terjadi surplus sebesar Rp 47.395.358.707,97. Sementara itu realisasi pembiayaan dari sisi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 84.976.526.830,15 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu sebesar Rp 93.192.379.650,12.

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 863.218.726.155,23, Belanja Modal sebesar Rp 550.169.583.691,01, dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 1.818.249.000,00.

Grafik III.5 Proporsi Realisasi Belanja pada APBD Tahun 2019

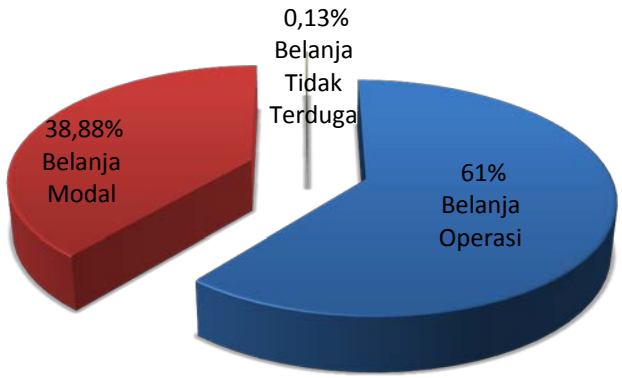

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pada Tahun 2019 Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp 87.678.699.130,00, menurun 23,34 persen dibanding Penerimaan Pembiayaan

Tahun 2018 yang sebesar Rp 375.685.415.036,00. Pada Tahun 2019 terdapat Pengeluaran Pembiayaan Daerah berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank, dengan jumlah Rp48.506.144.973,00 sehingga di tahun 2019 Pembiayaan Neto Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp39.172.554.157,00.

Rincian realisasi APBD 2019 (*unaudited*) sebagai berikut:

Tabel III.10 Laporan Realisasi APBD T.A 2019

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Unaudited)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	2018
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN**	**1.649.765.942.056,00**	**1.606.774.948.876,21**	**97,39%**	**1.231.736.333.081,42**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	18.202.500.000,00	23.004.622.021,67	126,38%	19.312.102.493,59
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	6.425.945.800,00	9.150.885.925,25	142,41%	4.907.846.756,75
1.1.3	Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.040.179.924,00	4.078.067.768,59	80,91%	4.723.091.851,75
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	85.932.990.114,00	57.257.852.710,68	66,63%	41.447.419.295,39
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**115.601.615.838,00**	**93.491.428.426,19**	**80,87%**	**70.390.460.397,48**
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**				
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**				
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	80.927.738.000,00	67.500.359.374,00	83,41%	72.352.317.085,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	714.671.775.903,00	736.620.944.539,00	103,07%	496.807.515.659,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	282.770.235.000,00	278.328.579.000,00	98,43%	259.192.257.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	54.735.751.000,00	48.771.572.836,00	89,10%	70.685.695.263,00
1.2.1.5	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	60.305.298.000,00	57.203.885.119,00	94,86%	47.977.601.300,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	**1.193.410.797.903,00**	**1.188.425.340.868,00**	**99,58%**	**947.015.386.307,00**
1.2.2	**Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**				
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	-	-		-
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	34.774.857.000,00	34.774.857.000,00	100,00%	28.609.375.000,00
1.2.2.3	Dana Insentif Daerah	20.057.499.000,00	10.028.749.000,00	50,00%	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pusat Lainnya	**54.832.356.000,00**	**44.803.606.000,00**	**81,71%**	**28.609.375.000,00**
1.2.3	**Transfer Pemerintah Provinsi**				
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	120.760.772.315,00	112.899.178.708,00	93,49%	109.228.438.000,00
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil lainnya	-	-	-	-
1.2.3.3	Bantuan Keuangan	143.800.000.000,00	143.800.000.000,00	100,00%	51.250.000.000,00

Nomor Urut	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	2018
1	2	3	4	5	6
	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	**264.560.772.315,00**	**256.699.178.708,00**	**97,03%**	**160.478.438.000,00**
	Total Pendapatan Transfer	**1.512.803.926.218,00**	**1.489.928.125.576,00**	**98,49%**	**1.136.103.199.307,00**
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**				
1.3.1	Pendapatan Hibah	21.360.400.000,00	23.355.394.874,02	109,34%	25.242.673.376,94
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
1..3,3	Pendapatan lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah	**21.360.400.000,00**	**23.355.394.874,02**	**109,34%**	**25.242.673.376,94**
	Jumlah Pendapatan	**1.649.765.942.056,00**	**1.606.774.948.876,21**	**97,39%**	**1.231.736.333.081,42**
2	**BELANJA**				
2.1	**BELANJA OPERASI**				
2.1.1	Belanja Pegawai	568.042.233.164,00	545.131.118.159,00	95,97%	497.532.679.195,00
2.1.2	Belanja Barang	316.079.725.868,00	270.000.735.893,23	85,42%	187.517.234.638,46
2.1.3	Belanja Bunga	26.081.955.375,00	25.913.448.052,00	99,35%	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	23.044.251.875,00	21.925.224.051,00	95,14%	51.039.782.167,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	251.000.000,00	248.200.000,00	98,88%	-
	Jumlah Belanja Operasi	**933.499.166.282,00**	**863.218.726.155,23**	**92,47%**	**736.089.696.000,46**
2.2	**BELANJA MODAL**				
2.2.1	Belanja Tanah	20.002.171.338,00	14.047.670.957,00	70,23%	17.088.055.840,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	64.368.031.526,00	58.009.164.767,01	90,12%	47.586.237.506,12
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	53.514.129.230,00	45.293.932.466,00	84,64%	52.560.488.191,43
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	470.865.570.853,00	432.720.015.501,00	91,90%	530.609.241.229,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	138.800.000,00	98.800.000,00	71,18%	-
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	**608.888.702.947,00**	**550.169.583.691,01**	**90,36%**	**647.844.022.766,55**
2.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**				
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	1.818.249.000,00	90,91%	564.808.860,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	**2.000.000.000,00**	**1.818.249.000,00**	**90,91%**	**564.808.860,00**
	Jumlah Belanja	**1.544.387.869.229,00**	**1.415.206.558.846,24**	**91,64%**	**1.384.498.527.627,01**
3	**TRANSFER**	**-**	**-**		**-**
3.1	**TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA**	**-**	**-**		**-**
3.1.1	Bagi Hasil Pajak	-	-		-
3.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-		-
3.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-		-
	Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa	-	-		-
3.2	**TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN**				
3.2.1	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	1.553.539.200,00	1.509.360.000,00	97,16%	1.553.539.200,00
3.2.2	Bantuan Keuangan ke Desa	142.248.205.402,00	141.914.788.940,00	99,77%	118.526.955.676,00
3.2.2	Bantuan Keuangan Lainnya	748.882.382,00	748.882.382,00	100,00%	737.416.834,00
	Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan	**144.550.626.984,00**	**144.173.031.322,00**	**99,74%**	**120.817.911.710,00**
	Jumlah Transfer	**144.550.626.984,00**	**144.173.031.322,00**	**99,74%**	**120.817.911.710,00**
	Jumlah Belanja dan Transfer	**1.688.938.496.213,00**	**1.559.379.590.168,24**	**92,33%**	**1.505.316.439.337,01**
	Surplus/ (Defisit)	**(39.172.554.157,00)**	**47.395.358.707,97**	**-120,99%**	**(273.580.106.255,59)**

Nomor Urut	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	2018
1	2	3	4	5	6
4	**PEMBIAYAAN**				
4.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**87.678.699.130,00**	**84.976.526.830,15**	**96,92%**	**339.628.678.318,74**
4.1.1	Penggunaan SiLPA	56.989.224.114,00	56.989.224.114,15	100,00%	29.940.633.259,74
4.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
4.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-
4.1.4	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	-	-	-	-
4.1.5	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
4.1.6	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-
4.1.7	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	30.689.475.016,00	27.987.302.716,00	91,20%	309.688.045.059,00
4.1.8	Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	-	-	-	-
4.1.9	Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya	-	-	-	-
4.1.10	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-
4.1.11	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-
4.1.12	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
		-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	**87.678.699.130,00**	**84.976.526.830,15**	**96,92%**	**339.628.678.318,74**
4.2	**PENGELUARAN DAERAH**	**48.506.144.973,00**	**39.179.505.888,00**	80,77%	**9.059.347.949,00**
4.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
4.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.500.000.000,00	3.000.000.000,00	54,55%	4.000.000.000,00
4.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	-	-	-	-
4.2.4	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
4.2.5	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-
4.2.6	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	43.006.144.973,00	36.179.505.888,00	84,13%	5.059.347.949,00
4.2.7	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	-	-	-	-
4.2.8	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya	-	-	-	-
4.2.9	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-
4.2.10	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-
4.2.11	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
		-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	**48.506.144.973,00**	**39.179.505.888,00**	**80,77%**	**9.059.347.949,00**
	Pembiayaan Neto	**39.172.554.157,00**	**45.797.020.942,15**	**116,91%**	**330.569.330.369,74**
3.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**	**-**	**93.192.379.650,12**	-	**56.989.224.114,15**

Realisasi anggaran pada program-program yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja 2019 dirincikan sebagai berikut :

Tabel III.11 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program T.A 2019

No	Program	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Pembangunan danPeningkatan Sarana dan PrasaranaGedung/Kantor/FasilitasUmum	1.413.100.000,00	1.102.956.824,00	78,05
2	Penanaman Bambu PadaKanan Kiri Sungai,Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air(DTA), Sekitar Mata Air dan Daerah Imbuhan Air Tanah	47.600.000,00	30.820.900,00	64,75
3	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	6.131.480.000,00	5.800.042.056,00	94,59
4	Pengadaan bangunan konservasi tanah dan air	61.790.000,00	58.690.300,00	94,98
5	Peningkatan Kualitas Keluarga	96.565.980,00	91.378.980,00	94,63
6	Program pengendalian da npengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	111.300.000,00	111.183.000,00	99,89
7	Program perencanaan pembangunan daerah	2.675.030.500,00	2.253.595.021,00	84,25
8	Program perencanaan pembangunan ekonomi	481.900.000,00	280.921.479,00	58,29
9	Program Bantuan dan Perlindungan Jaminan Sosial	58.250.000,00	55.170.089,00	94,71
10	Program Energi dan Sumber Daya Mineral	50.000.000,00	18.730.200,00	37,46
11	Program Keluarga Berencana	2.608.515.000,00	2.348.745.786,00	90,04
12	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	295.800.000,00	290.943.400,00	98,36
13	Program kerjasama informasi dan media massa	141.600.000,00	125.494.950,00	88,63
14	Program Kerjasama Masalah Peraturan Perundang - Undangan	474.500.000,00	464.334.700,00	97,86
15	Program Kerjasama Pembangunan	144.278.000,00	89.410.800,00	61,97
16	Program ketahanan sosialdan ekonomi	17.603.300,00	16.813.300,00	95,51
17	Program Lingkungan Sehat Perumahan	134.550.000,00	121.689.300,00	90,44
18	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	511.490.000,00	449.411.547,00	87,86
19	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	85.000.000,00	71.362.500,00	83,96
20	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.118.908.000,00	1.738.744.647,00	82,06
21	Program Optimalisasi Keamanan Informasi dan Persandian	52.920.000,00	37.414.400,00	70,70
22	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	116.191.080,00	107.370.400,00	92,41
23	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	68.419.151.252,00	62.835.001.443,00	91,84
24	Program Pelayanan dan Dukungan Kelancaran Administrasi Kecamatan	12.813.535.504,00	11.956.081.425,00	93,31
25	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	368.420.000,00	324.865.119,00	88,18
26	Program Pelayanan Kedinasan	65.000.000,00	56.651.940,00	87,16
27	Program Pelayanan Kesehatan	19.820.630.789,00	14.670.822.201,00	74,02
28	Program pelayanan kontrasepsi	54.600.000,00	52.888.640,00	96,87
29	Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	46.250.000,00	8.439.150,00	18,25
30	Program Pemanfaatan Ruang	665.210.000,00	303.660.791,00	45,65

No	Program	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
31	Program Pembangunan Daerah	1.842.409.000,00	1.373.257.350,00	74,54
32	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	16.881.801.189,00	12.901.825.968,00	76,42
33	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	280.701.758.301,00	256.548.438.594,00	91,40
34	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	3.588.517.774,00	2.570.523.374,00	71,63
35	Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	28.620.643.000,00	27.530.220.324,00	96,19
36	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	1.498.613.000,00	1.461.354.300,00	97,51
37	Program Pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan	112.520.000,00	-	0,00
38	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	635.090.000,00	350.390.460,00	55,17
39	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	17.475.000,00	13.570.600,00	77,66
40	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	11.283.312.000,00	3.025.594.581,00	26,81
41	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan	269.960.000,00	234.730.000,00	86,95
42	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan/ peternakan lapangan	98.070.000,00	89.152.000,00	90,91
43	Program pembinaan anak terlantar	12.280.000,00	11.924.600,00	97,11
44	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	116.000.000,00	111.867.212,00	96,44
45	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota	43.905.000,00	37.248.000,00	84,84
46	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	191.839.000,00	190.173.563,00	99,13
47	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	4.907.667.000,00	3.832.499.909,00	78,09
48	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	15.496.703.000,00	12.009.788.610,00	77,50
49	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial(eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	200.000.000,00	-	0,00
50	Program Pembinaan Keagamaan	1.527.375.000,00	1.507.009.705,00	98,67
51	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	11.000.000,00	10.015.200,00	91,05
52	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	6.080.000,00	5.690.000,00	93,59
53	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/ KR yang madiri	37.000.000,00	35.101.780,00	94,87
54	Program pemeliharaan ketentraman, ketertiban perlindungan masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	153.350.000,00	146.756.560,00	95,70
55	Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	19.908.000,00	17.186.700,00	86,33
56	Program penanaman pohon pada lahan di luar kawasan	89.280.000,00	80.765.140,00	90,46
57	Program Penanganan Bidang Hukum	901.388.000,00	835.459.205,00	92,69
58	Program Penanggulangan Kebakaran	63.300.000,00	59.811.500,00	94,49
59	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.613.392.336,00	1.473.108.259,00	91,31
60	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	639.605.168,00	421.274.794,00	65,86
61	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	170.400.000,00	51.504.215,00	30,23

No	Program	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
62	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	20.589.424.357,00	14.389.052.143,00	69,89
63	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	3.575.165.000,00	2.745.657.692,00	76,80
64	Program Penataan Struktur Industri	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
65	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	10.000.000,00	9.310.000,00	93,10
66	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.517.587.000,00	1.110.753.005,00	73,19
67	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	616.955.000,00	607.840.880,00	98,52
68	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	84.174.000,00	82.796.200,00	98,36
69	Program penciptaan iklimUsaha Kecil Menengah yang kondusif	69.100.000,00	68.905.000,00	99,72
70	Program Pendidikan Anak Usia Dini	167.800.000,00	131.573.575,00	78,41
71	Program Pendidikan Non Formal	110.390.000,00	98.882.500,00	89,58
72	Program pendidikan politik masyarakat	832.925.000,00	772.645.693,00	92,76
73	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana	786.023.627,00	475.776.076,00	60,53
74	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	8.352.499.000,00	5.536.431.858,00	66,28
75	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	14.753.799.000,00	11.518.548.838,00	78,07
76	Program Pengawasan Obat dan Makanan	42.050.000,00	26.320.100,00	62,59
77	Program pengelolaan areal pemakaman	1.017.595.000,00	968.094.912,00	95,14
78	Program Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kepegawaian	566.300.000,00	565.293.300,00	99,82
79	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	95.000.000,00	90.515.000,00	95,28
80	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	3.833.982.158,00	3.602.768.111,00	93,97
81	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	39.711.700,00	37.705.700,00	94,95
82	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	387.241.000,00	349.643.533,00	90,29
83	Program pengembangan budidaya perikanan	485.800.000,00	441.207.300,00	90,82
84	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	12.367.975.000,00	11.712.925.154,00	94,70
85	Program Pengembangandata /informasi	418.160.000,00	285.753.399,00	68,34
86	Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah	477.515.000,00	125.702.550,00	26,32
87	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	129.600.000,00	105.630.000,00	81,50
88	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	210.000.000,00	120.577.922,00	57,42
89	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	32.500.000,00	32.402.200,00	99,70
90	Program Pengembangan Kemitraan	30.000.000,00	29.636.000,00	98,79
91	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	47.050.662.500,00	46.832.466.739,00	99,54
92	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	9.454.172.000,00	8.830.000.342,00	93,40
93	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	9.630.700.000,00	8.447.155.576,00	87,71

No	Program	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
94	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	57.116.000,00	37.187.000,00	65,11
95	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	646.670.000,00	501.548.200,00	77,56
96	Program Pengembangan Nilai Budaya	1.228.300.000,00	1.208.587.540,00	98,40
97	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
98	Program Pengembangan Perikanan dan Kelautan	1.338.149.000,00	1.017.763.800,00	76,06
99	Program pengembangan perikanan tangkap	2.143.040.000,00	1.800.413.540,00	84,01
100	Program Pengembangan Perumahan	449.805.000,00	387.931.300,00	86,24
101	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	15.900.000,00	15.815.000,00	99,47
102	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	38.250.000,00	38.104.000,00	99,62
103	Program Pengembangan Usaha Perkebunan	114.200.000,00	111.613.100,00	97,73
104	Program pengembangan wawasan kebangsaan	539.227.500,00	494.201.500,00	91,65
105	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	36.354.479.456,00	23.564.508.258,00	64,82
106	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	24.250.000,00	23.718.500,00	97,81
107	Program pengendalian banjir	2.008.600.000,00	1.722.935.953,00	85,78
108	Program Pengendalian Penanganan Bencana	1.190.230.600,00	1.174.008.149,00	98,64
109	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	219.593.000,00	149.982.725,00	68,30
110	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	304.849.000,00	300.496.800,00	98,57
111	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	13.035.689.200,00	10.402.678.047,00	79,80
112	Program peningkatan disiplin aparatur	1.483.912.600,00	1.432.413.620,00	96,53
113	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	4.340.601.000,00	3.885.689.929,00	89,52
114	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	749.145.000,00	711.116.317,00	94,92
115	Program Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan dan Pencegahan, Penyelamatan	230.624.000,00	216.399.550,00	93,83
116	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	23.278.248.700,00	22.955.531.135,00	98,61
117	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	4.194.390.000,00	4.063.030.042,00	96,87
118	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	254.915.000,00	250.802.900,00	98,39
119	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	210.615.000,00	184.527.255,00	87,61
120	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	474.951.000,00	322.914.670,00	67,99
121	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	9.965.525.000,00	7.575.577.900,00	76,02
122	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	661.577.500,00	634.689.750,00	95,94
123	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	2.586.564.000,00	925.693.988,00	35,79
124	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	21.500.000,00	19.941.000,00	92,75
125	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	117.406.000,00	104.756.250,00	89,23
126	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/ perkebunan	434.055.000,00	380.127.806,00	87,58
127	Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan	20.396.997,00	20.369.141,00	99,86

No	Program	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
128	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	14.850.000,00	12.252.600,00	82,51
129	Program Peningkatan Kualitas dan ProduktivitasTenaga Kerja	310.300.000,00	239.031.600,00	77,03
130	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	546.234.278,00	465.182.762,00	85,16
131	Program PeningkatanKualitas Kelembagaan Koperasi	10.000.000,00	9.995.000,00	99,95
132	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	56.272.800,00	55.436.900,00	98,51
133	Program Peningkatan Layanan Perpustakaan	80.000.000,00	77.294.700,00	96,62
134	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	32.000.000.000,00	46.249.013.391,00	144,53
135	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	11.089.900.000,00	7.841.340.000,00	70,71
136	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1.636.868.000,00	1.392.070.656,00	85,04
137	Program peningkatan pelayanan angkutan	224.454.000,00	209.863.400,00	93,50
138	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	5.428.005.000,00	4.694.549.048,00	86,49
139	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Umum	114.200.000,00	104.031.500,00	91,10
140	Program Peningkatan Pelayanan Tamu Daerah	400.000.000,00	249.026.877,00	62,26
141	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	1.119.642.000,00	862.957.500,00	77,07
142	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	52.750.000,00	52.459.200,00	99,45
143	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan	730.000.000,00	676.371.500,00	92,65
144	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	569.312.000,00	475.426.763,00	83,51
145	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	187.078.000,00	161.336.900,00	86,24
146	Program peningkatan peran serta kepemudaan	981.530.000,00	974.339.500,00	99,27
147	Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan	107.367.300,00	103.406.800,00	96,31
148	Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	62.593.590,00	56.472.168,00	90,22
149	Program peningkatan produksi hasil peternakan	519.210.000,00	441.617.473,00	85,06
150	Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	4.439.415.000,00	3.437.295.213,00	77,43
151	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	155.000.000,00	144.477.142,00	93,21
152	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	560.280.000,00	473.217.588,00	84,46
153	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	18.031.652.500,00	16.134.653.763,00	89,48
154	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	4.650.885.000,00	3.576.053.595,00	76,89
155	Program peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga	698.530.000,00	551.300.902,00	78,92
156	Program peningkatan SDM petugas teknis dan penyuluh perikanan	89.924.000,00	88.737.788,00	98,68
157	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.022.473.000,00	927.887.786,00	90,75
158	Program Peningkatan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Kesehatan Jiwa	44.700.000,00	43.027.500,00	96,26
159	Program penyediaan dan pengolahan air baku	81.849.121.052,00	77.536.168.030,00	94,73
160	Program Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	6.695.000,00	6.180.000,00	92,31

No	Program	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
161	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah	145.000.000,00	134.400.000,00	92,69
162	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	130.245.000,00	79.150.350,00	60,77
163	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	19.075.000,00	12.660.000,00	66,37
164	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	574.410.685,00	481.463.371,00	83,82
165	Program Perencanaan Tata Ruang	262.210.000,00	160.600.323,00	61,25
166	Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional	323.260.000,00	319.486.220,00	98,83
167	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	589.082.000,00	570.549.570,00	96,85
168	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	1.540.880.000,00	673.025.290,00	43,68
169	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	130.850.000,00	128.327.910,00	98,07
170	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	85.010.000,00	75.105.000,00	88,35
171	Program Pro-PPK-PPU	1.621.950.000,00	1.451.104.308,00	89,47
172	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	315.000.000,00	304.924.000,00	96,80
173	Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan	15.980.836.000,00	14.945.011.687,00	93,52
174	Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana	143.017.000,00	140.998.154,00	98,59
175	Program Transmigrasi Lokal	10.750.000,00	10.203.700,00	94,92
176	Program Upaya Kesehatan Esensial	3.552.340.904,00	2.322.614.354,00	65,38
177	Program Upaya Kesehatan Lainnya	2.703.855.360,00	1.943.962.717,00	71,90
178	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	32.266.595.448,00	19.312.625.737,00	59,85
179	Program Upaya Kesehatan masyarakat Pengembangan dan Upaya Kesehatan Lainnya	1.220.169.304,00	763.834.500,00	62,60
180	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	84.309.780.881,00	77.508.560.484,24	91,93
Jumlah Anggaran		**1.052.047.953.170,00**	**929.293.006.974,24**	**88,33**

BAB IV
Penutup

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan serta sebagai tolak ukut untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pemerintah daerah dalam rangka akuntabilitas dan transparansi.

Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 umumnya menggambarkan kinerja yang sangat baik. Dari 12 sasaran strategis yang ditetapkan hampir seluruhnya berhasil dicapai dengan sangat baik namun masih ada beberapa indikator kinerja sasaran yang capaiannya belum optimal.

Capaian kinerja yang sudah sangat baik maupun yang belum menjadi suatu motivasi untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun depan. Dari hasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019, dapat dirumuskan beberapa strategi solusi bagi kendala yang ada dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan kinerja yang lebih baik, sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada seluruh OPD pada setiap kesempatan tentang pentingnya Laporan Kinerja yang disampaikan tepat waktu dan akurasi data yang dihimpun.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi serta perbaikan secara berkala atas efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan komitmen jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
4. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan.

Akhirnya, besar harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara ini mampu dijadikan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik di masa yang akan

datang, yang tentunya tak mungkin berhasil tanpa adanya perbaikan-perbaikan di berbagai sektor sebagaimana dijelaskan di atas.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja

REVISI PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Abdul Gafur Mas'ud, S.E

Jabatan : Bupati Penajam Paser Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Penajam, September 2019

Bupati Penajam Paser Utara

H. Abdul Gafur Mas'ud, S.E

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	(1)	(2)	(3)
1	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Jumlah UKM Pertahun	50 UKM
		Persentase Koperasi Aktif	4 %
2	Mengurangi Angka Pengangguran	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Untuk Tenaga Kerja	80 Orang
		Persentase Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan	85 %
3	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Angka Partisipasi Kasar (APK):	
		- APK PAUD 3 – 6 Tahun	78 %
		- APK SD/MI	100 %
		- APK (SMP)N/MTs	100 %
		Bertambahnya Lembaga PAUD Holistik Integratif	136 Lembaga
		Meningkatnya Jumlah Lembaga PAUD Berakreditasi B	100 Lembaga
		Angka Partisipasi Murni (APM):	
		- APM SD/MI	91,80 %
		- APM (SMP)N/MTs	81,10 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	(1)	(2)	(3)
		Angka Putus Sekolah (APS):	
		- Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,02 %
		- Angka Putus Sekolah (APS) SMP N/ MTs	0,07 %
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke (SMP)N/MTs	100 %
		Angka Kelulusan:	99,98 %
		- Angka Kelulusan SD/MI	99,98 %
		- Angka Kelulusan (SMP)N/MTs	99,82 %
4	Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda	Jumlah Medali yang Diperoleh dalam Berbagai Event Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	2 Medali
		Jumlah Siswa yang Berprestasi SD/SMP	4 Siswa
		Jumlah Siswa SD/SMP yang Mengikuti Pembibitan dan Pembinaan	40 Siswa
		Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	3 Kegiatan
5	Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian	Rasio Penyuluh Peningkatan Sumber Daya Penyuluh Pertanian Bagi Pemberdayaan Petani	1 : 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	(1)	(2)	(3)
6	Meningkatkan Kerjasama Perekonomian	PMA dan PMDN serta Nilai Investasi yang Diperoleh	PMA : Rp 12.500.000.000 PMDN : Rp 100.000.000.000
7	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Desa dan Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	80 %
8	Terwujudnya Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Terbangunnya Jaringan Jalan Kondisi Baik	43,45 Km
		Persentase Jalan yang Memiliki Drainase	19 %
9	Meningkatkan PAD dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Opini BPK	WTP
		PAD	Rp 155.661.611.902
10	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Predikat Akuntabilitas (LKIP)	B
11	Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik Berbasis Web	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi	38 Aplikasi
12	Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Tercapainya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	85 %

No.	Program	Anggaran (Rp)
1	Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor/Fasilitas Umum	1.624.000.000
2	Penanaman Bambu Pada Kanan Kiri Sungai, Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA), Sekitar Mata Air dan Daerah Imbuhan Air Tanah	882.325.000
3	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	6.131.480.000
4	Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	990.460.000
5	Peningkatan Kualitas Keluarga	72.989.000
6	Program Bantuan dan Perlindungan Jaminan Sosial	58.250.000
7	Program Keluarga Berencana	2.608.515.000
8	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	204.600.000
9	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	141.600.000
10	Program Kerjasama Masalah Peraturan Perundang - Undangan	470.000.000
11	Program Kerjasama Pembangunan	144.278.000
12	Program Ketahanan Sosial dan Ekonomi	17.603.300
13	Program Lingkungan Sehat Perumahan	106.450.000
14	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	511.490.000
15	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	85.000.000
16	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.118.908.000
17	Program Optimalisasi Keamanan Informasi dan Persandian	12.000.000
18	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	46.026.000
19	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	62.845.525.349
20	Program Pelayanan dan Dukungan Kelancaran Administrasi Kecamatan	12.825.288.930

No.	Program	Anggaran (Rp)
21	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	88.220.000
22	Program Pelayanan Kedinasan	65.000.000
23	Program Pelayanan Kesehatan	21.030.630.789
24	Program Pelayanan Kontrasepsi	54.600.000
25	Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	138.600.000
26	Program Pemanfaatan Ruang	550.630.000
27	Program Pembangunan Daerah	1.901.059.000
28	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan	16.403.301.189
29	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	250.770.910.051
30	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	14.038.517.774
31	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	23.911.608.000
32	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	1.453.413.000
33	Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan	62.520.000
34	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	745.090.000
35	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	17.475.000
36	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	11.283.312.000
37	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	578.660.000
38	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan/Peternakan Lapangan	98.070.000
39	Program Pembinaan Anak Terlantar	12.280.000
40	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	116.000.000

No.	Program	Anggaran (Rp)
41	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	58.444.000
42	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	191.839.000
43	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	3.525.677.000
44	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	10.295.200.000
45	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	200.000.000
46	Program Pembinaan Keagamaan	1.694.663.400
47	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	11.000.000
48	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	6.080.000
49	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	37.000.000
50	Program Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	153.350.000
51	Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	19.988.000
52	Program Penanaman Pohon Pada Lahan di Luar Kawasan	983.150.000
53	Program Penanganan Bidang Hukum	801.388.000
54	Program Penanggulangan Kebakaran	38.000.000
55	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.613.396.292
56	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	514.793.418
57	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	30.400.000
58	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	11.383.757.457
59	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	2.543.865.000

No.	Program	Anggaran (Rp)
60	Program Penataan Struktur Industri	10.000.000
61	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	20.000.000
62	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.492.187.000
63	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	617.000.000
64	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	88.600.000
65	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	19.100.000
66	Program Pendidikan Anak Usia Dini	167.800.000
67	Program Pendidikan Non Formal	400.590.000
68	Program Pendidikan Politik Masyarakat	832.925.000
69	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana	722.523.627
70	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	8.602.499.000
71	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	4.027.145.000
72	Program Pengawasan Obat dan Makanan	42.050.000
73	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	816.595.000
74	Program Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kepegawaian	365.400.000
75	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	95.000.000
76	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.667.106.160
77	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	39.711.700
78	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	395.555.000

No.	Program	Anggaran (Rp)
79	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	285.800.000
80	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	11.052.867.000
81	Program Pengembangan Data/Informasi	355.960.000
82	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	477.275.000
83	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	579.600.000
84	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	110.000.000
85	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	32.500.000
86	Program Pengembangan Kemitraan	30.000.000
87	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	43.758.987.800
88	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	8.720.308.000
89	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	9.438.700.000
90	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	86.440.000
91	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	444.570.000
92	Program Pengembangan Nilai Budaya	1.206.300.000
93	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	25.000.000
94	Program Pengembangan Perikanan dan Kelautan	1.338.149.000
95	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	2.191.740.000
96	Program Pengembangan Perumahan	182.800.000
97	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	15.900.000

No.	Program	Anggaran (Rp)
98	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	34.550.000
99	Program Pengembangan Usaha Perkebunan	114.200.000
100	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	539.227.500
101	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	55.396.922.982
102	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	15.000.000
103	Program Pengendalian Banjir	465.400.000
104	Program Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	115.000.000
105	Program Pengendalian Penanganan Bencana	923.800.800
106	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	219.593.000
107	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	239.274.000
108	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	10.309.117.300
109	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.355.556.000
110	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	4.352.601.000
111	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	464.645.000
112	Program Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan dan Pencegahan, Penyelamatan	32.100.000
113	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	19.695.950.500
114	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.068.260.000
115	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	245.695.000
116	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	202.565.000

No.	Program	Anggaran (Rp)
117	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	597.654.000
118	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	9.965.525.000
119	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	661.577.500
120	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	2.586.564.000
121	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	21.500.000
122	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	76.400.000
123	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	442.455.000
124	Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan	23.000.000
125	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	14.850.000
126	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	310.300.000
127	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	73.000.000
128	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	541.836.410
129	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	10.000.000
130	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	52.762.500
131	Program Peningkatan Layanan Perpustakaan	80.000.000
132	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	30.000.000.000
133	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10.946.400.000
134	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	1.092.660.000
135	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	147.055.000

No.	Program	Anggaran (Rp)
136	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	5.946.702.000
137	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Umum	114.200.000
138	Program Peningkatan Pelayanan Tamu Daerah	400.000.000
139	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	1.119.642.000
140	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	52.750.000
141	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	730.000.000
142	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	514.132.000
143	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	204.270.000
144	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	597.830.000
145	Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan	135.388.500
146	Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	45.393.800
147	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	519.065.000
148	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	3.931.115.000
149	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	155.000.000
150	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	449.980.000
151	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	13.173.086.600
152	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	4.393.770.000
153	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga	698.530.000
154	Program Peningkatan SDM Petugas Teknis dan Penyuluh Perikanan	89.924.000

No.	Program	Anggaran (Rp)
155	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	708.898.000
156	Program Peningkatan Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Kesehatan Jiwa	44.700.000
157	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	81.849.121.052
158	Program Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	5.000.000
159	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	144.000.000
160	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	131.145.000
161	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	27.237.500
162	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.391.440.000
163	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	383.500.000
164	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	515.860.685
165	Program Perencanaan Tata Ruang	262.210.000
166	Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional	273.710.000
167	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	589.082.000
168	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1.540.880.000
169	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	130.850.000
170	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	85.010.000
171	Program Pro-PPK-PPU	1.700.000.000
172	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	115.000.000
173	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	3.284.156.651
174	Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana	143.030.000
175	Program Transmigrasi Lokal	20.000.000

No.	Program	Anggaran (Rp)
176	Program Upaya Kesehatan Esensial	2.735.396.000
177	Program Upaya Kesehatan Lainnya	2.478.340.168
178	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	32.047.845.448
179	Program Upaya Kesehatan masyarakat Pengembangan dan Upaya Kesehatan Lainnya	1.117.154.304
180	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	62.989.188.600
	Jumlah Anggaran	**956.489.893.036**

Penajam, September 2019
Bupati Penajam Paser Utara

H. Abdul Gafur Mas'ud, S.E

Rencana Kinerja Tahunan

RENCANA KINERJA TAHUNAN

KABUPATEN : PENAJAM PASER UTARA
TAHUN : 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	(1)	(2)	(3)
1	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Jumlah UKM Pertahun	50 UKM
		Persentase Koperasi Aktif	4 %
2	Mengurangi Angka Pengangguran	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Untuk Tenaga Kerja	80 Orang
		Persentase Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan	85 %
3	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Angka Partisipasi Kasar (APK):	
		- APK PAUD 3 – 6 Tahun	78 %
		- APK SD/MI	100 %
		- APK (SMP)N/MTs	100 %
		Bertambahnya Lembaga PAUD Holistik Integratif	136 Lembaga
		Meningkatnya Jumlah Lembaga PAUD Berakreditasi B	100 Lembaga

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	(1)	(2)	(3)
		Angka Partisipasi Murni (APM):	
		- APM SD/MI	91,80 %
		- APM (SMP)N/MTs	81,10 %
		Angka Putus Sekolah (APS):	
		- Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,02 %
		- Angka Putus Sekolah (APS) SMP N/ MTs	0,07 %
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke (SMP)N/MTs	100 %
		Angka Kelulusan:	99,98 %
		- Angka Kelulusan SD/MI	99,98 %
		- Angka Kelulusan (SMP)N/MTs	99,82 %
4	Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda	Jumlah Medali yang Diperoleh dalam Berbagai Event Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	2 Medali
		Jumlah Siswa yang Berprestasi SD/SMP	4 Siswa
		Jumlah Siswa SD/SMP yang Mengikuti Pembibitan dan Pembinaan	40 Siswa
		Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	3 Kegiatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	(1)	(2)	(3)
5	Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian	Rasio Penyuluh Peningkatan Sumber Daya Penyuluh Pertanian Bagi Pemberdayaan Petani	1 : 1
6	Meningkatkan Kerjasama Perekonomian	PMA dan PMDN serta Nilai Investasi yang Diperoleh	PMA : Rp 12.500.000.000 PMDN : Rp 100.000.000.000
7	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Desa dan Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	80 %
8	Terwujudnya Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Terbangunnya Jaringan Jalan Kondisi Baik	43,45 Km
		Persentase Jalan yang Memiliki Drainase	19 %
9	Meningkatkan PAD dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Opini BPK	WTP
		PAD	Rp 155.661.611.902
10	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Predikat Akuntabilitas (LKIP)	B
11	Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik Berbasis Web	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi	38 Aplikasi
12	Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Tercapainya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	85 %

Pengukuran Kinerja

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Jumlah UKM Pertahun	50 UKM	58 UKM	116
		Persentase Koperasi Aktif	4 %	26,05 %	651,25
2	Mengurangi Angka Pengangguran	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Untuk Tenaga Kerja	80 Orang	72 Orang	90
		Persentase Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan	85 %	100 %	117,65
3	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Angka Partisipasi Kasar (APK):			
		- APK PAUD 3 – 6 Tahun	78 %	36 %	46,15
		- APK SD/MI	100 %	106,22 %	106,22
		- APK (SMP)N/MTs	100 %	112,44 %	112,44
		Bertambahnya Lembaga PAUD Holistik Integratif	136 Lembaga	152 Lembaga	111,76
		Meningkatnya Jumlah Lembaga PAUD Berakreditasi B	100 Lembaga	63 Lembaga	63

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Angka Partisipasi Murni (APM):			
		- APM SD/MI	91,80 %	95,58 %	104,12
		- APM (SMP)N/MTs	81,10 %	89,16 %	109,94
		Angka Putus Sekolah (APS):			
		- APS SD/MI	0,02 %	0,88 %	25
		- APS SMP N/ MTs	0,07 %	1,70 %	4,12
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke (SMP)N/MTs	100 %	85,50 %	85,50
		Angka Kelulusan			
		- Angka Kelulusan SD/MI	99,98 %	100 %	100,02
		- Angka Kelulusan (SMP)N/MTs	99,82 %	100 %	100,18
4	Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda	Jumlah Medali yang Diperoleh dalam Berbagai Event Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	2 Medali	18 Medali	900
		Jumlah Siswa yang Berprestasi SD/SMP	4 Siswa	39 Siswa	975
		Jumlah Siswa SD/SMP yang Mengikuti Pembibitan dan Pembinaan	40 Siswa	39 Siswa	97,50
		Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian	Rasio Penyuluh Peningkatan Sumber Daya Penyuluh Pertanian Bagi Pemberdayaan Petani	1 : 1	1 : 1	100
6	Meningkatkan Kerjasama Perekonomian	PMA dan PMDN serta Nilai Investasi yang Diperoleh	PMA : Rp 12.500.000.000	PMA PMA : Rp 66.963.000.000	535,70
			PMDN : Rp 100.000.000.000	PMDN : Rp 1.007.135.600.000	1007,14
7	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Desa dan Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	80 %	76,42 %	95,53
8	Terwujudnya Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Terbangunnya Jaringan Jalan Kondisi Baik	43,45 Km	94 Km	216,34
		Persentase Jalan yang Memiliki Drainase	19 %	21 %	110,53
9	Meningkatkan PAD dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Opini BPK	WTP	WTP	100
		PAD	Rp 155.661.611.902	Rp 83.792.193.447,36	53,83
10	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Predikat Akuntabilitas (LKIP)	B	CC	97,67

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik Berbasis Web	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi	38 Aplikasi	38 Aplikasi	100
12	Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Tercapainya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	85 %	100 %	117,65

Jumlah Anggaran Tahun 2019 : Rp 1.052.047.953.170,00

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2019 : Rp 929.293.006.974,24

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6 (4 - 5)
1	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Jumlah UKM Pertahun	116	99,72	16,28
		Persentase Koperasi Aktif	651,25	99,95	551,30
2	Mengurangi Angka Pengangguran	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Untuk Tenaga Kerja	90	77,03	12,97
		Persentase Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan	117,65	98,07	19,58
3	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Angka Partisipasi Kasar (APK):			
		- APK PAUD 3 – 6 Tahun	46,15	78,41	-32,26
		- APK SD/MI	106,22	87,86	18,36
		- APK (SMP)N/MTs	112,44	87,86	24,58
		Bertambahnya Lembaga PAUD Holistik Integratif	111,76	78,41	33,35
		Meningkatnya Jumlah Lembaga PAUD Berakreditasi B	63	78,41	-15,41
		Angka Partisipasi Murni (APM):			
		- APM SD/MI	104,12	87,86	16,26
		- APM (SMP)N/MTs	109,94	87,86	22,08
		Angka Putus Sekolah (APS):			
		- APS SD/MI	25	87,86	-62,86
		- APS SMP N/MTs	4,12	87,86	-83,74
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke (SMP)N/MTs	85,5	87,86	-2,36
		Angka Kelulusan:			0,00
		- Angka Kelulusan SD/MI	100,02	87,86	12,16
		- Angka Kelulusan (SMP)N/MTs	100,18	87,86	12,32

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6 (4 - 5)
4	Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Pemuda	Jumlah Medali yang Diperoleh dalam Berbagai Event Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	900	99,27	800,73
		Jumlah Siswa yang Berprestasi SD/SMP	975	99,27	875,73
		Jumlah Siswa SD/SMP yang Mengikuti Pembibitan dan Pembinaan	97,5	99,27	-1,77
		Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	100	99,27	0,73
5	Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian	Rasio Penyuluh Peningkatan Sumber Daya Penyuluh Pertanian Bagi Pemberdayaan Petani	100	90,91	9,09
6	Meningkatkan Kerjasama Perekonomian	PMA dan PMDN serta Nilai Investasi yang Diperoleh			
		- PMA	535,7	84,46	451,24
		- PMDN	1007,14	84,46	922,68
7	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Desa dan Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan	95,53	76,42	19,11
8	Terwujudnya Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Terbangunnya Jaringan Jalan Kondisi Baik	216,34	91,25	125,09
		Persentase Jalan yang Memiliki Drainase	110,53	95,51	15,02

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6 (4 - 5)
9	Meningkatkan PAD dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Opini BPK	100	77,75	22,25
		PAD	53,83	93,22	-39,39
10	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Predikat Akuntabilitas (LKjIP)	97,67	84,85	12,82
11	Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik Berbasis Web	Meningkatnya Jumlah Layanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi	100	89,79	10,21
12	Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Tercapainya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	117,65	98,39	19,26